

**KONGRES HMI KE-VIII TAHUN 1966 DI SURAKARTA  
PADA MASA TRANSISI PEMERINTAHAN  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan  
guna Melengkapi gelar Sarjana Sastra Jurusan Ilmu Sejarah  
Fakultas Sastra dan Seni Rupa  
Universitas Sebelas Maret

**Disusun oleh:**

**ALDI FIRAHMAN**  
**C0503008**

**FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**  
*commit to user*  
**2010**

## PERSETUJUAN

### KONGRES HMI KE-VIII TAHUN 1966 DI SURAKARTA PADA MASA TRANSISI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Disusun oleh:

**ALDI FIRAHMAN**  
C0503008



Telah disetujui oleh pembimbing

Pembimbing

**Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si.**  
NIP. 196112251987031003

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

**Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum.**  
NIP. 195402231986012001

## PENGESAHAN

### KONGRES HMI KE-VIII TAHUN 1966 DI SURAKARTA PADA MASA TRANSISI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Disusun oleh:

**ALDI FIRAHMAN**  
**C0503008**

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret  
Pada Tanggal Juni 2010

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	<u>Drs. Sawitri Pri Prabawati, M.Pd</u> NIP. 195806011986012001	.....
Sekretaris	<u>Waskito Widi Wardoyo, S.S</u> NIP. 197108282005011001	.....
Penguji I	<u>Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si</u> NIP. 196112251987031003	.....
Penguji II	<u>Dra. Isnaini W. W, M.Pd</u> NIP. 195905091985032001	.....

Dekan  
Fakultas Sastra dan Seni Rupa  
Universitas Sebelas Maret

**Drs. Sudarno, M.A**  
**NIP. 131472202**

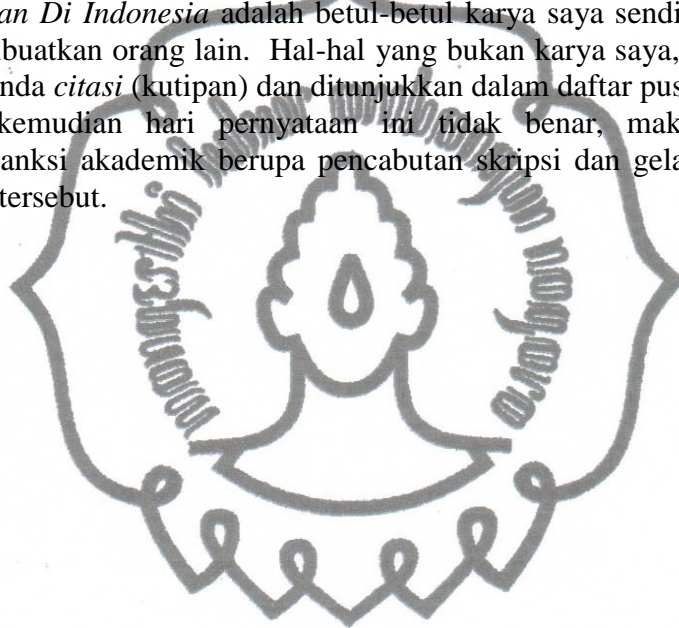
## PERNYATAAN

Nama : Aldi Firahman

NIM : C0503008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul *Kongres HMI ke-VIII Tahun 1966 Di Surakarta Dan Pengaruhnya Pada Masa Transisi Pemerintahan Di Indonesia* adalah betul-betul karya saya sendiri, bukan plagiat, dan tidak dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberikan tanda *citasi* (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut.



Surakarta, Juni 2010

Yang membuat pernyataan,

**Aldi Firahman**

*commit to user*

## MOTTO

*“Kita mau terus berjuang...hampir hancur lebur! Bangkit kembali!...*

*Hampir hancur lebur! Bangkit kembali!...*

*Hanya dengan itulah kita menjadi bangsa besar!*

*Bangsa yang digembleng oleh keadaan...”*

(Bung Karno)



*commit to user*

## PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Bapak dan Ibuku

(untuk doa, kasih sayang, dan setiap tetes keringat serta air mata yang selalu tercurah untukku)

- Abang-abangku, Bang Boy dan Andri

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam, karena hanya dengan kehadiran dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini :

1. Drs. Sudarno, M.A. selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.
2. Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terima kasih atas nasehat, bimbingan serta kesabarannya yang diberikan selama penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret.
3. Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si. selaku pembimbing akademik sekaligus juga pembimbing skripsi. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. Dan terima kasih pula atas kesediaannya meluangkan waktu dan kesabarannya kepada penulis untuk konsultasi dan memberikan petunjuk selama dalam penulisan skripsi ini.

*commit to user*



4. Seluruh Staf Pengajar Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menjalani kuliah.
5. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa dan seluruh Staf Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan pelayanannya sehingga penulis mendapatkan informasi sebagai bahan penulisan skripsi.
6. Dr. Soelastomo, selaku Ketua HMI periode 1963-1966 dan Pemimpin Umum Harian Umum Pelita atas penjelasan informasi dan wawancaranya. Teman-teman PB HMI Jakarta, atas cerita-cerita dan pengalamannya serta kesediaan memberikan info mengenai para alumninya.
7. Bapak, Ibu dan Abang-abangku atas doa, kesabaran, dorongan, dan semangat yang tidak pernah kenal lelah selalu diberikan kepada penulis selama penulis menjalani studi dan menyelesaikan skripsi di Solo.
8. Keluarga besar PMPA Sentraya Bhuana, LPM Kalpadruma, HMI Komisariat M. Iqbal atas segala ilmu, pengalaman, dan persaudaraan yang tidak mungkin penulis dapatkan hanya dari menjalani kuliah saja.
9. Keluarga besar mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret yang telah membantu penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang dengan segala upaya dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan segala amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa.

*commit to user*



Penulis sadar bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini tidak menjadi seperti pohon pisang yang hanya berbuah satu kali kemudian mati.

Surakarta, November 2010



Penulis

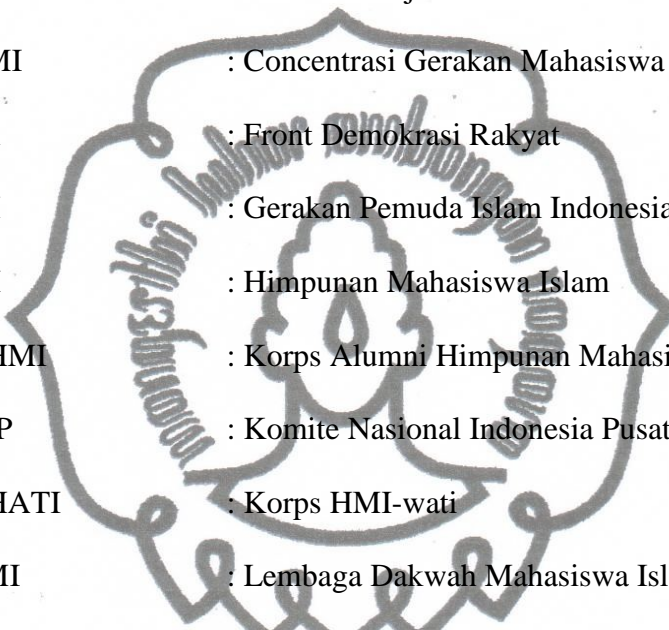
*commit to user*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PESETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR FOTO.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Teknik Pengumpulan Data.....	10
a. Studi Dokumen.....	10
b. Studi Pustaka.....	11
c. Wawancara.....	11
2. Teknik Analisa Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II SURAKARTA SEBAGAI LOKASI KONGRES HMI KE-VIII</b>	
<b>TAHUN 1966</b> .....	<b>14</b>
A. Kondisi Sosial Kota Surakarta.....	14
1. Gambaran Umum Kota Surakarta.....	14
a. Letak dan Batas..... <i>commit to user</i> .....	14

b. Keadaan Wilayah.....	15
c. Demografi.....	16
1.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	17
1.2. Keanekaragaman Penduduk.....	20
2. Kondisi Sosial Masyarakat dan Organisasi Islam Di Surakarta...	21
a. Umat Islam Surakarta Pada Masa Awal Kemerdekaan.....	21
b. Perkembangan Pendidikan dan Organisasi Islam di Surakarta.....	24
1. Sekolah-Sekolah Muhammadiyah.....	27
2. Perguruan Al Islam.....	29
3. Mambaul Ulum Kasunanan Surakarta.....	30
4. Cokroaminoto.....	32
B. Kondisi Politik Kota Surakarta.....	35
1. Ringkasan Politik Awal Kota Surakarta.....	35
2. Kota Surakarta Sebagai Basis Politik PKI.....	37
<b>BAB III KONGRES HMI KE-VIII TAHUN 1966 DI SURAKARTA....</b>	40
A. Sejarah Singkat HMI.....	40
B. Arti Politis Dan Strategis Kongres HMI ke-VIII Tahun 1966 di Surakarta.....	42
1. Persiapan Kongres.....	46
2. Pencalonan Ketua Umum.....	48
3. Pelaksanaan Kongres.....	50
4. Pendirian KAHMI.....	53
5. HMI dan KAHMI.....	54
<b>BAB IV KONGRES HMI KE-VIII TAHUN 1966 DAN KONDISI         POLITIK PADA MASA TRANSISI.....</b>	57
A. Dualisme Kepemimpinan Nasional.....	57
B. Hubungan Soekarno dan HMI.....	61
C. Hubungan Soeharto dan HMI.....	70
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	77
<b>LAMPIRAN.....</b>	80

## DAFTAR SINGKATAN



ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Angkatan Darat
BKS	: Badan Kerja Sama
BPKNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
CGMI	: Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
KAHMI	: Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KOHATI	: Korps HMI-wati
LDMI	: Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam
Masyumi	: Majelis Syura Muslimin Indonesia
MMC	: Merapi Merbabu Kompleks
MU	: Mambaul Ulum
Parpol	: Partai Politik
PB	: Pengurus Besar
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPMI	: Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia
PRRI	: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PSI	: Partai Sosialis Indonesia

Pesindo	: Pemuda Sosialis Indonesia
RPKAD	: Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat
SARBUPRI	: Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SATF	: Sidik, Amanat, Tabligh, Fatonah
SH	: Sarjana Hukum
SI	: Sarekat Islam
STI	: Sekolah Tinggi Islam
Supersemar	: Surat Perintah Sebelas Maret
TK	: Taman Kanak-kanak
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UII	: Universitas Islam Indonesia



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah penduduk di tiap-tiap Kecamatan Kota Surakarta pada tahun 1961.....	17
Tabel 2.	Jumlah penduduk Karesidenan Surakarta 1950-1955.....	19



*commit to user*

**DAFTAR FOTO**

Foto 1. Karikatur Harian Rakyat 2 Oktober 1965..... 44

Foto 2. Kongres HMI di Surakarta tahun 1966..... 49

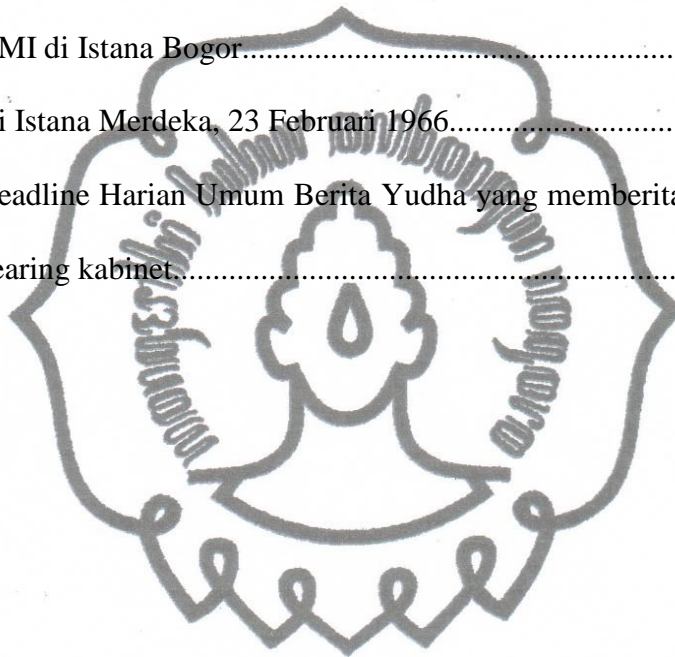
Foto 3. Soelastomo menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban  
Pengurus Besar HMI..... 52

Foto 4. Demonstrasi Gerakan Muda Islam (Gemuis)..... 60

Foto 5. HMI di Istana Bogor..... 62

Foto 6. Di Istana Merdeka, 23 Februari 1966..... 69

Foto 7. Headline Harian Umum Berita Yudha yang memberitakan tentang  
hearing kabinet..... 72





**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.	Daftar Informan.....	79
Lampiran 2.	Foto-foto Seputar Peristiwa Kongres.....	80
Lampiran 3.	Amanat Jenderal Soeharto Ketua Presidium Men Utama Hankam Menteri Panglima Angkatan Darat Pada Pembukaan Kongres HMI VIII Surakarta Tanggal 9 September 1966.....	81
Lampiran 4.	Laporan Pengurus Besar HMI Pada Kongres HMI VIII Surakarta Tanggal 9 September 1966.....	86
Lampiran 5.	Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam.....	95
Lampiran 6.	Susunan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 1963-1966.....	101

## ABSTRAK

**Aldi Firahman.** C0503008. *Kongres HMI ke-VIII Tahun 1966 Di Suraakarta Pada Masa Transisi Pemerintahan Di Indonesia.* Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, (1) Apa latar belakang dipilihnya Kota Surakarta sebagai lokasi Kongres HMI ke-VIII tahun 1966? (2) Apa substansi dan pokok-pokok pikiran hasil Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 terhadap kondisi sosial politik? (3) Bagaimana peranan HMI dilihat dari Kongres tersebut pada masa transisi pemerintahan di Indonesia?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dipilihnya Kota Surakarta sebagai lokasi Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 di tengah situasi pasca Gerakan 30 September, mengetahui substansi dan pokok-pokok pikiran hasil Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 terhadap kondisi sosial politik, dan mengetahui peranan HMI dilihat dari Kongres tersebut pada masa transisi pemerintahan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, adapun sumber data dalam penelitian ini berupa wawancara sebagai sumber primer. Data primer lainnya adalah dokumen-dokumen seperti Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PB HMI, pidato sambutan Jenderal Soeharto dalam pembukaan Kongres. Sebagai sumber sekunder peneliti menggunakan artikel surat kabar, buku-buku, atau majalah yang memuat persoalan relevan atau berkaitan dengan tema. Teknis analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, dengan demikian penulis menggunakan analisa yang bersifat deskriptif-analitis dalam menceritakan laporan hasil penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dipilihnya Kota Surakarta sebagai lokasi kongres karena HMI secara implisit ingin menunjukkan bahwa HMI dapat bertahan dan menundukkan keperkasaan PKI karena Kota Surakarta merupakan basis massa PKI terbesar. Di dalam Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 di Surakarta ini terlihat bahwa HMI merestui dan juga berada di balik terbentuknya Orde Baru yang akan menggantikan Orde Lama. Hal ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Ketua Umum HMI yang memaparkan beberapa strategi yang pada intinya adalah memuluskan jalannya pembentukan Orde Baru. Selain itu dalam kongres ini, di undang juga Jenderal Soeharto untuk memberikan pidato sambutan dalam acara pembukaan kongres. Dalam pidatonya, Jenderal Soeharto mengajak kepada seluruh keluarga besar HMI untuk menjebol Orde Lama dan bersama-sama membangun mental Orde Baru. Setelah Kongres ini pun akhirnya berbuntut kepada di undanginya beberapa anggota HMI untuk menghadiri acara hearing kabinet dalam pembentukan pemerintahan Orde Baru. Dan beberapa orang HMI akhirnya dapat menduduki jabatan menteri.

## ABSTRAK

**Aldi Firahman.** C0503008. *HMI Congress-VIII to the Year 1966 In Surakarta On The Period of Transitional Government of Indonesia.* Thesis Department of History Faculty of Literature and Fine Arts Sebelas Maret University of Surakarta.

The problems discussed in this study namely, (1) What is the background Surakarta chosen as the location to the HMI Congress-VIII? (2) What is the substance and main points to mind the results of the HMI Congress-VIII in 1966 to the socio-political conditions? (3) How does the role of HMI visits from Congress on the transition of government in Indonesia?.

This study aimed to know the background of Surakarta chosen as the location of the HMI to the Seventh Congress in 1966 amid post-September 30 Movement, knowing the substance and main points to mind the results of the HMI Congress-VIII in 1966 to the socio-political conditions, and know the role views of the HMI Congress during the governmental transition in Indonesia. The methods used in this research is the historical method, as for the source of the data in this study are interviews as primary sources. Other primary data documents such as General Chairman of PB Accountability Report HMI, General Suharto's speech at the opening of Congress. As a secondary source research using newspaper articles, books, or magazines that contain relevant issues or related themes. Technical analysis of data is qualitative data analysis techniques, thereby analyzing uses descriptive-analytical in the telling of the writing of the report.

The results of this study indicate that the background chosen as the location of Surakarta congress because implicitly HMI HMI want to show that courage to survive and beat the PKI because of Surakarta is the largest PKI mass base. Inside the HMI to the Congress-VIII in 1966 in Surakarta is seen that the HMI blessing and also was behind the formation of New Order that will replace the Old Order. It can be seen in the accountability report of the General Chairman of HMI is presents some strategies which in essence is a paved path forming New Order. Also in this congress, General Suharto was also invited to give a speech for the opening of the congress. In his speech, General Suharto appealed all the big family for breaking into the Old Order HMI and shared mental construct of the New Order. After Congress finally tails to the invited several members of the HMI to attend hearings in the formation of the cabinet of the New Order government. And some people HMI can eventually occupy ministerial positions.

*commit to user*

**KONGRES HMI KE-VIII TAHUN 1966 DI SURAKARTA  
PADA MASA TRANSISI PEMERINTAHAN  
DI INDONESIA**

Aldi Firahman<sup>1</sup>  
Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

2011. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, (1) Apa latar belakang dipilihnya Kota Surakarta sebagai lokasi Kongres HMI ke-VIII tahun 1966? (2) Apa substansi dan pokok-pokok pikiran hasil Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 terhadap kondisi sosial politik? (3) Bagaimana peranan HMI dilihat dari Kongres tersebut pada masa transisi pemerintahan di Indonesia?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dipilihnya Kota Surakarta sebagai lokasi Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 di tengah situasi pasca Gerakan 30 September, mengetahui substansi dan pokok-pokok pikiran hasil Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 terhadap kondisi sosial politik, dan mengetahui peranan HMI dilihat dari Kongres tersebut pada masa transisi pemerintahan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, adapun sumber data dalam penelitian ini berupa wawancara sebagai sumber primer. Data primer lainnya adalah dokumen-dokumen seperti Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PB HMI, pidato sambutan Jenderal Soeharto dalam pembukaan Kongres. Sebagai sumber sekunder peneliti menggunakan artikel surat kabar, buku-buku, atau majalah yang memuat persoalan relevan atau berkaitan dengan tema. Teknis analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif,

dengan demikian penulis menggunakan analisa yang bersifat deskriptif-analitis dalam menceritakan laporan hasil penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dipilihnya Kota Surakarta sebagai lokasi kongres karena HMI secara implisit ingin menunjukkan bahwa HMI dapat bertahan dan menundukkan keperkasaan PKI karena Kota Surakarta merupakan basis massa PKI terbesar. Di dalam Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 di Surakarta ini terlihat bahwa HMI merestui dan juga berada di balik terbentuknya Orde Baru yang akan menggantikan Orde Lama. Hal ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Ketua Umum HMI yang memaparkan beberapa strategi yang pada intinya adalah memuluskan jalannya pembentukan Orde Baru. Selain itu dalam kongres ini, di undang juga Jenderal Soeharto untuk memberikan pidato sambutan dalam acara pembukaan kongres. Dalam pidatonya, Jenderal Soeharto mengajak kepada seluruh keluarga besar HMI untuk menjebol Orde Lama dan bersama-sama membangun mental Orde Baru. Setelah Kongres ini pun akhirnya berbuntut kepada di undanginya beberapa anggota HMI untuk menghadiri acara hearing kabinet dalam pembentukan pemerintahan Orde Baru. Dan beberapa orang HMI akhirnya dapat menduduki jabatan menteri.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah dengan NIM C0503008

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing

**HMI CONGRESS-VIII TO THE YEAR 1966 IN  
SURAKARTA ON THE PERIOD OF TRANSITIONAL  
GOVERNMENT OF INDONESIA**

Aldi Firahman<sup>1</sup>  
Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si<sup>2</sup>

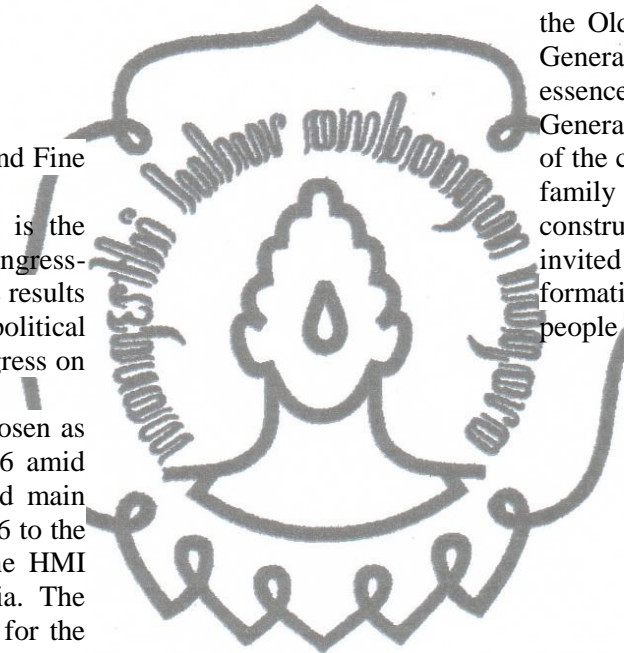
**ABSTRACT**

2011. Thesis Department of History Faculty of Literature and Fine Arts Sebelas Maret University of Surakarta.

The problems discussed in this study namely, (1) What is the background Surakarta chosen as the location to the HMI Congress-VIII? (2) What is the substance and main points to mind the results of the HMI Congress-VIII in 1966 to the socio-political conditions? (3) How does the role of HMI visits from Congress on the transition of government in Indonesia?.

This study aimed to know the background of Surakarta chosen as the location of the HMI to the Seventh Congress in 1966 amid post-September 30 Movement, knowing the substance and main points to mind the results of the HMI Congress-VIII in 1966 to the socio-political conditions, and know the role views of the HMI Congress during the governmental transition in Indonesia. The methods used in this research is the historical method, as for the source of the data in this study are interviews as primary sources. Other primary data documents such as General Chairman of PB Accountability Report HMI, General Suharto's speech at the opening of Congress. As a secondary source research using newspaper articles, books, or magazines that contain relevant issues or related themes. Technical analysis of data is qualitative data analysis techniques, thereby analyzing uses descriptive-analytical in the telling of the writing of the report.

The results of this study indicate that the background chosen as the location of Surakarta congress because implicitly HMI HMI want to show that courage to survive and beat the PKI because of Surakarta is the largest PKI mass base. Inside the HMI to the Congress-VIII in 1966 in Surakarta is seen that the HMI blessing and also was behind the formation of New Order that will replace the Old Order. It can be seen in the accountability report of the General Chairman of HMI is presents some strategies which in essence is a paved path forming New Order. Also in this congress, General Suharto was also invited to give a speech for the opening of the congress. In his speech, General Suharto appealed all the big family for breaking into the Old Order HMI and shared mental construct of the New Order. After Congress finally tails to the invited several members of the HMI to attend hearings in the formation of the cabinet of the New Order government. And some people HMI can eventually occupy ministerial positions.



---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah dengan NIM C0503008

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kajian mengenai sejarah organisasi mahasiswa dan gerakan-gerakannya di Indonesia adalah suatu fenomena yang sangat menarik. Salah satunya adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Dari namanya sudah jelas bahwa ini adalah organisasi mahasiswa Islam. Di antara sekian panjang perjalanan HMI, Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 di Surakarta merupakan saat-saat yang mempunyai arti penting. Bukan saja bagi HMI sendiri, melainkan bagi suasana politik di Indonesia pada waktu itu.

Menjelang kongres HMI ke- VIII tahun 1966 di Surakarta berlangsung, dalam dunia kemahasiswaan saja, upaya pengganyangan terhadap HMI sudah dimulai. Pada saat Kongres PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia), yang merupakan federasi dari perhimpunan mahasiswa ekstra universiter yang kelima di Jakarta pada tanggal 5-10 Juli tahun 1961, CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan kawan-kawannya berhasil mendepak keluar HMI dari susunan pengurus Presidium PPMI Pusat. Hasil ini sejalan dengan keputusan Kongres CGMI (yang berafiliasi pada PKI) kedua di Salatiga pada bulan Juni 1961 untuk melikuidasi HMI. Demikian pula suasana politik secara keseluruhan, menyusul pembubaran Masyumi dan GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) yang akhirnya menempatkan posisi HMI, yang tidak

berafiliasi pada parpol Islam yang ada, memberi peluang ada kesan keterkaitan HMI dengan Masyumi.<sup>1</sup>

Partai-partai yang dibubarkan tersebut memang merupakan partai-partai yang lebih moderat daripada partai lainnya dan yang terpenting adalah gerakannya dalam menentang komunis dilakukan secara terbuka. Karena Sukarno dan partainya (PNI) sudah jauh bergerak kekiri, akhirnya di bawah “demokrasi terpimpin”, Sukarno membubarkan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Islam Masyumi yang modernis.<sup>2</sup> HMI disangkutkutan partai-partai tersebut dimungkinkan karena HMI merupakan organisasi mahasiswa dengan pemikiran yang modern dan moderat.

Pengganyangan HMI semakin meningkat lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 2/64 tertanggal 12 Mei 1964 oleh Prof. Drs. Ernest Utrecht, SH, Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jember. Surat itu menetapkan bahwa HMI adalah organisasi yang terlarang di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jember. Alasannya, HMI terlibat peristiwa PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), Permesta, DI/TII, percobaan pembunuhan Presiden, agen CIA, dan lain-lain. Dan sejak saat itu juga berita-berita di surat kabar dipenuhi dengan penggayangan terhadap HMI.<sup>3</sup>

Sebelum peristiwa pemberontakan 30 September tekanan untuk pembubaran HMI semakin gencar saja. Dan ini terbukti pada acara pembukaan

---

<sup>1</sup> Sulastomo, 1989, *Hari-hari Yang Panjang 1963-1966*, Jakarta: CV. Masagung, hal. 1.

<sup>2</sup> Marshall Green, 1992, *Dari Sukarno ke Soeharto, G 30 S-PKI Dari Kacamata Seorang Duta Besar*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti., hal. 26.  
*commit to user*

<sup>3</sup> Sulastomo, *Op.cit.*, hal. 11.



Kongres CGMI tanggal 29 September 1965 yaitu Aidit, pucuk pimpinan PKI, menuntut pembubaran HMI di hadapan Bung Karno.

Ternyata HMI dapat bertahan sampai melaksanakan Kongres ke-VIII tahun 1966 di Surakarta. Dan ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 di Surakarta dan sekelumit persoalannya menjadi sangat istimewa. Apalagi masa-masa transisi kepemimpinan nasional seperti di depan mata setelah diterbitkannya Supersemar. Ini menjadikan Kongres HMI ke- VIII tahun 1966 di Surakarta menjadi sangat menarik untuk dikaji dan ditelusuri.

Bila melihat kebelakang sebelum berlangsungnya kongres ini, HMI juga ikut dalam pertarungan baik secara politik maupun fisik dengan PKI. Setelah terbentuknya Orde Baru, PKI dianggap sebagai musuh pemerintah, sehingga pelarangan bahkan pemusnahan terhadap PKI dan pengikut-pengikutnya menjadi agenda wajib bagi pemerintahan Orde Baru. HMI sebagai musuh PKI disinyalir juga berada di belakang pemerintahan Orde Baru.

Sejak awal tahun 1966, Sulastomo, Ketua Umum HMI periode 1963 -1966 sudah mulai berpikir persiapan Kongres HMI ke-VIII. Kongres ini semestinya dilaksanakan pada tahun 1965. Tetapi keadaan tidak memungkinkan. Baginya, kongres itu sangat istimewa. Istimewa dari segi pengakhiran tugas yang perlu disyukuri, tetapi juga istimewa dari segi pemilihan tempat kongres, yaitu Surakarta. Bagi HMI dan bahkan juga dari segi Perjuangan Orde Baru, pemilihan kota Surakarta juga mempunyai arti yang penting. Surakarta adalah kota yang dikenal sebagai Kota PKI. Dengan berlangsungnya Kongres HMI di Surakarta, maka ada gambaran yang memutar kenyataan sejarah. Kota Surakarta yang

dikenal sebagai basis komunis, akan menjadi tuan rumah kongres sebuah organisasi mahasiswa yang antikomunis. Semua itu sungguh mempunyai arti politis yang sangat penting dan strategis. Menurutnya, kongres itu niscaya akan mengakhiri keperkasaan PKI di kota Surakarta.<sup>4</sup>

Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 di Surakarta akan mempunyai arti yang sangat penting. Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 di Surakarta merupakan Kongres HMI yang terbesar. Peserta kongres mencapai 3000 orang dan bahkan anggota RPKAD juga ikut untuk membantu pengamanan. Jenderal Suharto, Jenderal Nasution dan sejumlah menteri ikut memberi sambutan.<sup>5</sup>

Menurut Sulastomo, tahun-tahun menjelang Kongres tersebut merupakan tahun yang berat bagi HMI. Mempertahankan diri dari penganyangan CGMI/PKI semestinya tidak layak dilawan oleh HMI. PKI adalah partai politik yang sangat militan, dengan jaringan organisasi yang rapi, mempunyai banyak organisasi pendukung, dan juga penguasaan media massa. Anggota PKI sudah mencapai jutaan orang. Belum lagi kekuatan pendukung PKI yang berbaju lain. Tentu tidak sebanding dengan HMI, sebuah organisasi mahasiswa (Islam) yang independen, tidak mempunyai payung politik yang formal, tidak punya media massa dan hanya terdiri dari anak-anak muda yang jumlah anggotanya hanya ribuan saja. Bila diibaratkan, seperti gajah dengan semut. Tentu saja ini cuma sekadar pengandaian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 73.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 79.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Soelastomo (10 Desember 2007)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

- a. Apa latar belakang Surakarta dipilih sebagai lokasi Kongres HMI ke-VIII tahun 1966?
- b. Apa substansi dan pokok-pokok pikiran hasil Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 terhadap kondisi sosial politik di Indonesia?
- c. Bagaimana peranan HMI dalam masa transisi pemerintahan di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Latar belakang dipilihnya Surakarta sebagai lokasi Kongres HMI ke-VIII tahun 1966.
- b. Substansi dan pokok-pokok pikiran kongres HMI ke-VIII tahun 1966 terhadap situasi sosial politik di Indonesia
- c. Peranan HMI dalam masa transisi pemerintahan di Indonesia.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan ilmu yang ada kaitannya dengan pengaruh gerakan mahasiswa, khususnya pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan. Kemudian juga memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Sejarah yang berkaitan dengan tema tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pemecahan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

Mengetahui secara lengkap kongres HMI ke-VIII tahun 1966 di Surakarta diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi politik pada masa transisi baik sebelum maupun sesudahnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu sejarah, khususnya kajian sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia dan menjadi masukan yang berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung serta melengkapi sumber-sumber data yang tersedia, sebagai bahan penulisan maka dilengkapi dengan pustaka yang mendukung. Beberapa pustaka yang digunakan dalam penulisan ini sebagai landasan penelitian antara lain :

Sulastomo (1989), begitu rinci menuliskan kembali pengalaman hidupnya selama dia menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI tahun 1963-1966 dalam bukunya *Hari-hari Yang Panjang 1963-1966*. Dalam kurun waktu itu, ia menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI, sebuah organisasi mahasiswa yang *commit to user*

sangat dimusuhi oleh PKI. Bahkan jabatan itu masih dipegangnya ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965. Sulastomo juga melampirkan beberapa dokumen sejarah, yang sekiranya dapat membantu memahami peristiwa pada tahun 1965.

Agussalim Sitompul (1976), seorang aktivis HMI di Yogyakarta merangkai perjalanan HMI dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*. Buku ini berisi tentang perjalanan HMI sebagai organisasi Mahasiswa Islam yang didirikan di Yogyakarta hingga pada pemerintahan Orde Baru tahun 1975.

Marshall Green (1995) seorang Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia ketika Gerakan 30 September meletus menulis buku *Dari Sukarno ke Soeharto*. Dengan mengalami dan menyaksikan sendiri berbagai kejadian, Green dapat mengumpulkan informasi dari tangan pertama, terlepas dari apakah dalam penyajiannya terdapat bias politik.

Victor Tanja (1982) dalam *Himpunan Mahasiswa Islam* berusaha untuk memberikan gambaran tentang HMI, tentang lahirnya dan perkembangannya, kegiatannya, kedudukan ideologis serta tempatnya di tengah-tengah dan di dalam hubungannya dengan gerakan-gerakan pembaharu muslim di Indonesia.

Kemudian buku Francois Raillon (1989) yang berjudul *Politik Dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*. Buku ini menggambarkan bahwa ketika semakin nyata pemerintahan Presiden Sukarno yang tidak dapat dibenarkan lagi, mahasiswa mengadakan demonstrasi-demonstrasi untuk melancarkan berbagai protes dan tuntutan. Bahu-membahu dengan kelompok militer yang mengambil alih kekuasaan, ternyata mahasiswa tidak hanya merupakan kekuatan politik fisik

dan massal, namun juga intelektual dan ideologis. Pemikiran-pemikiran mereka secara menyolok terbaca dalam mingguan Mahasiswa Indonesia, yang dengan lantang menyuarakan rasionalisasi dan modernisasi kehidupan bernegara. Buku ini menggambarkan bahwa mahasiswa ikut bertanggungjawab atas tampilnya pemerintahan Orde Baru.

Sidratahta Mukhtar (2006), secara kritis dalam bukunya *HMI dan Kekuasaan* mengetengahkan besarnya peranan HMI dalam melahirkan kader-kader politik bangsa. Buku hasil studinya ini memperlihatkan bahwa HMI merupakan organisasi yang memiliki tingkat sosialisasi politik yang tinggi pada struktur kekuasaan politik.

## F. Metode Penelitian

Sejarah tidak mempunyai suatu metodologi, tetapi sejarah memiliki metode. Perbedaannya yaitu suatu metodologi meletakkan suatu rangkaian peraturan serta fungsi yang harus ditaati dalam segala keadaan, dan semua itu berada dalam urutan yang ketat bila dikehendaki hasil yang layak. Sedangkan metode menyarankan rangkaian pengertian dasar akan tetapi melihat penerapannya sebagai bagian proses yang diawasi oleh yang melakukan penelitian. Proses ini pun tidak ketat, justru sangat longgar. Landasan utama metode sejarah adalah bagaimana menangani bukti-bukti sejarah dan bagaimana menghubungkannya. Setelah bermacam-macam bukti ditemukan dan dicatat maka semuanya itu harus dipertimbangkan lagi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> William H Frederick dan Soeri Soeroto, 1991, *Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: LP3ES), hal. 13-14.



Sejarah harus ditulis melalui prosedur yang disebut Metode Sejarah. Metode ini mempunyai empat tahapan yang integral, yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.

Heuristik adalah kegiatan berupa penghimpunan jejak-jejak masa lampau, yakni peninggalan sejarah atau sumber apa saja yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian studi sejarah.

Kemudian hasil pengerjaan studi sejarah yang akademis atau kritis memerlukan fakta-fakta yang telah teruji. Oleh karena itu, data-data yang diperoleh melalui tahapan heuristik terlebih dahulu harus dikritik atau disaring sehingga diperoleh fakta-fakta yang seobjektif mungkin. Kritik tersebut berupa kritik tentang otentitasnya (kritik ekstern) maupun kredibilitas isinya (kritik intern), dilakukan ketika dan sesudah pengumpulan data berlangsung.

Setelah itu, data atau sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Namun demikian, sejarah itu sendiri bukanlah kumpulan dari fakta, parade tokoh, kronologis peristiwa, atau deskripsi belaka yang apabila dibaca akan terasa kering karena kurang mempunyai makna. Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar sesuatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kausal. Perlu pula dikemukakan di sini, bahwa dalam tahapan interpretasi inilah subjektifitas sejarawan bermula dan turut mewarnai tulisannya dan hal itu tak dapat dihindarkan. Walau demikian, seorang sejarawan harus berusaha sedapat mungkin menekan subjektifitasnya dan tahu posisi dirinya sehingga nantinya tidak membias ke dalam isi tulisannya.



Historiografi adalah penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Dapat dikatakan historiografi sebagai puncak dari rangkaian kerja seorang sejarawan, dan dari tahapan inilah dapat diketahui “baik buruknya” hasil kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam penulisan diperlukan kemampuan menyusun fakta-fakta yang bersifat fragmentaris ke dalam tulisan yang sistematis, utuh, dan komunikatif.<sup>8</sup>

Tujuan studi ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah, maka upaya merekonstruksi masa lampau dari obyek yang diteliti itu ditempuh melalui metode sejarah. Pengumpulan data atau sumber sebagai langkah pertama kali, dilangsungkan dengan metode penggunaan bahan dokumen karena ditemukan sumber-sumber tertulis baik yang memberikan informasi di seputar obyek maupun informasi langsung mengenai Kongres ini.<sup>9</sup>

## **1. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Dokumen**

Keberadaan dokumen sangat penting dalam penelitian ini yaitu sebagai sumber utama. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip-arsip berupa surat, teks pidato, dan foto. Dalam hal ini pencarian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini di Kantor Pusat PB HMI berupa Laporan Pengurus Besar HMI pada Kongres VIII di Surakarta 10 s.d 17 September 1966, teks pidato pembukaan yang disampaikan oleh Jenderal Soeharto Ketua Presidium

---

<sup>8</sup> Lebih lengkap dilihat di <http://bubuhanbanjar.wordpress.com/2009/03/19/mengenal-metode-sejarah/>.

<sup>9</sup> Mengenai metode ini, lihat misalnya Sartono Kartodirjo, “Metode Penggunaan Bahan Dokumenter”, dalam Koentjaraningrat, 1989, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia), halaman 45; Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang), hal. 94-97.

Men Utama Hankam Menteri Panglima Angkatan Darat, draft Susunan Pengurus Besar HMI Periode 19963/1965.

Selain itu dipakai sumber berupa surat kabar dan majalah yang memuat berita dan artikel mengenai Kongres HMI VIII di Surakarta. Mayoritas surat kabar yang digunakan sebagai sumber adalah surat kabar nasional dan beberapa yang berskala daerah yang diperoleh di Perpustakaan Nasional dan Monumen Pers Nasional. Surat kabar tersebut antara lain Harian Rakyat, Harian Umum Berita Yudha, Daulat Rakyat, Republika dan Serambi Indonesia

#### **b. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan memanfaatkan buku-buku dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini. Melalui studi pustaka dapat ditemukan informasi-informasi untuk melengkapi atau mendukung sumber-sumber yang ditemukan. Studi pustaka memegang peranan penting dalam upaya mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai tema yang diteliti. Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan FSSR UNS, Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan CSIS, Perpustakaan LIPI, dan Perpustakaan Permata Surakarta.

#### **c. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan beberapa orang yang mampu memberikan informasi sesuai dengan tema yang diambil. Wawancara dilakukan secara purposive yaitu menentukan informan pangkal yang selanjutnya akan diperoleh informan-informan lain yang merupakan pelaku dari peristiwa tersebut. Informan

pangkal dari penelitian ini adalah Soelastomo (Ketua Umum PB HMI th.1963) yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut didapatkan informan lain.

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara individu secara langsung. Artinya dengan mendatangi informan satu-persatu. Dalam kunjungan tersebut ditanyakan permasalahan yang dibahas sesuai dengan penelitian yang dikerjakan.

## 2. Teknik Analisa Data

Analisa merupakan langkah yang harus ditempuh setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Tahap ini merupakan tahapan yang menentukan dan penting. Pada tahap ini data dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penulisan.

Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif, yakni merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis. Berdasarkan analisa tersebut, maka penulis akan menggunakan analisa yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya, memaparkan suatu fenomena beserta ciri-ciri khusus yang terdapat dalam peristiwa tersebut.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang mencakup garis besar penulisan skripsi yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mengutarakan keadaan kota Surakarta sebagai lokasi Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 meliputi gambaran umum, kondisi sosial, kondisi politik pasca gerakan 30 September. Sehingga dapat menggambarkan mengapa Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi Kongres HMI ke-VIII tahun 1966.

Bab III menguraikan tentang pelaksanaan Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 dan hasil Kongres HMI ke-VIII tahun 1966.

Bab IV pembahasan difokuskan tentang peranan HMI ditinjau dari menjelang dan sesudah Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 pada masa transisi pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan, khususnya sikap-sikap HMI terhadap Soekarno (Orde Lama), dan Soeharto/ Militer/ TNI AD (Orde Baru).

Bab V adalah kesimpulan yang akan menjawab pentingnya Kongres tersebut dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

## BAB II

### SURAKARTA SEBAGAI LOKASI KONGRES HMI KE-VIII

#### TAHUN 1966

Surakarta sering disebut sebagai barometer politik nasional<sup>1</sup>. Ini bisa diartikan bahwa Surakarta sering dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi politik masyarakat di Indonesia. Sebab, tidak jarang sebuah isu nasional yang berkembang diawali dari Kota Surakarta. Hal ini seringkali juga sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang bermaksud menciptakan isu nasional dengan cara melemparkan isu tersebut di Surakarta terlebih dahulu. Reaksi masyarakat dan perkembangan politik di sana menjadi cermin dinamisnya masyarakat Surakarta.

#### A. Kondisi Sosial Kota Surakarta

##### 1. Gambaran Umum Kota Surakarta

###### a. Letak dan Batas

Letak kota Surakarta sangat strategis dan mudah dijangkau dari berbagai penjuru. Surakarta berada di antara dua pusat pertumbuhan kota yang cukup besar yaitu Semarang dan Surabaya. Selain itu wilayah Surakarta terletak di tengah-tengah wilayah pendukung yang sangat potensial, yaitu Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Klaten. Surakarta juga terletak pada dataran rendah yang berada pada pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Pepe dan Sungai Jenes. Kedua sungai tersebut membelah tengah kota Surakarta yang semuanya bermuara di

---

<sup>1</sup> Insiwi Febrary S.2002 *Fanatisme Massa Partai di Wilayah Surakarta (Studi Kasus Massa Partai Demokrasi Indonesia Tahun 1987-1999)* Skripsi S-1. Surakarta: Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret

Bengawan Solo. Surakarta mempunyai ketinggian kurang lebih 92 m diatas permukaan air laut. Secara astronomi Surakarta terletak antara 110°45'15"-110°45'35" BT dan 70°36"-70°56" LS. Sedangkan batas-batas wilayah Surakarta adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.

Dengan melihat batas wilayah tersebut, dapat dikatakan bahwa Surakarta secara geografis sangat strategis. Karena itu pulalah Surakarta menjadi lintasan yang dapat menghubungkan antara daerah satu dengan yang lainnya. Selain itu, Surakarta dianggap sebagai kota penghubung antara Semarang dan Surabaya.

Kondisi semacam ini memberikan pengaruh terhadap dinamika sosial, ekonomi, maupun politik di Surakarta. Dengan kondisi ini, masyarakat Surakarta mempunyai sifat yang cukup terbuka.<sup>3</sup>

#### **b. Keadaan Wilayah**

Wilayah Surakarta berada diantara dua gunung yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi. Hal ini menyebabkan wilayah Surakarta secara umum datar. Namun terdapat beberapa keadaan tanah yang bergelombang yang terdapat pada

---

<sup>2</sup> Pemerintah Daerah Kota Surakarta, 1997, *Informasi dan Promosi Solo Membangun*, Surakarta: Pemerintah Daerah Kota Surakarta, halaman 10.

<sup>3</sup> Muh. Muhson Nurul Khawari, 2003, *Gerakan Mahasiswa Kiri Di Solo*. SKRIPSI Jurusan Sejarah FSSR UNS, halaman 34.



bagian utara dan timur. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Surakarta sebagian besar adalah tanah liat berpasir serta terdapat endapan lumpur seperti di daerah Keraton dan Kedung Lumbu karena daerah tersebut dulunya daerah rawa.

Surakarta beriklim tropis dan mengalami dua kali pergantian musim dalam setahun. Pada musim kemarau di tempat-tempat yang terbasah masih menunjukkan curah hujan diatas minimum. Pada musim hujan curah hujan seringkali lebih tinggi dari perkiraan. Hal tersebut membuat daerah Surakarta sering dilanda banjir. Hal ini diakibatkan karena Bengawan Solo yang tidak mampu menampung air dari aliran sungai-sungai kecil di sekitarnya. Di sepanjang sejarahnya, kota Surakarta sering dilanda banjir. Tercatat pernah terjadi tujuh kali banjir besar yaitu di tahun 1866, 1886, 1897, 1902, 1904, 1958, 1966,<sup>4</sup> dan terakhir kali pada Desember 2007. Keadaan iklim pada daerah Surakarta mempunyai suhu maksimum 32,4° dan minimum 21,6° rata-rata tekanan udara 1008,74 mbs dan kelembaban udara 79. Kecepatan angin 0,4 knot dan arah angin 188°.<sup>5</sup>

Luas wilayah kota Surakarta seluruhnya 44.04 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam dua jenis tanah yaitu tanah sawah dan tanah kering. Luas tanah tersebut terbagi dalam beberapa daerah administratif besar dan kecil. Daerah administratif besar terdiri dari lima kecamatan dan 51 kelurahan.<sup>6</sup>

### c. Demografi

---

<sup>4</sup> Suhartono, 1989, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta: 1830-1920*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, hal. 24.

<sup>5</sup> Pemerintah Kota Surakarta, 1997, *Kenangan Emas Surakarta 50 Tahun*, Surakarta: Pemerintah Daerah Tingkat II Surakarta, hal. 21.

<sup>6</sup> Pusat Penelitian dan Kependudukan Gajah Mada, 1980, *Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Jawa*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Kependudukan Gajah Mada, hal. 164-165.

Pada masa perang revolusi fisik di tahun 1945-1949 pemerintah Karesidenan Surakarta belum bisa menjalankan perhitungan jumlah penduduk di wilayahnya. Perhitungan jumlah penduduk baru bisa dilakukan pada tahun 1950. Perhitungan ini dilakukan oleh DKR.<sup>7</sup>

### 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Menurut data statistik tahun 1955 Karesidenan Surakarta bahwa jumlah penduduk Kota Surakarta adalah 3.559.257 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk Kota Surakarta sendiri pada tahun 1961 berjumlah 363.472 jiwa<sup>8</sup> dengan rincian yaitu, jumlah penduduk perempuan 52 persen atau 189.694 dan jumlah penduduk laki-laki 48 persen atau 173.781 jiwa. Terlihat disini bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Di Tiap-tiap Kecamatan, Kota Surakarta Pada Tahun 1961**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Banjarsari	50.985	55.723	106.708
2	Jebres	36.238	38.874	75.874
3	Laweyan	31.429	23.805	65.234
4	Pasar Kliwon	31.234	34.825	66.059
5	Serengan	23.895	26.464	50.359
	<b>Jumlah</b>	<b>173.781</b>	<b>189.691</b>	<b>363.472</b>

Sumber: Sensus Penduduk 1961 penduduk desa Jawa. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Gajah Mada.

<sup>7</sup> DKR adalah suatu dinas yang menangani masalah kesehatan di seluruh Karesidenan Surakarta. DKR sendiri merupakan kepanjangan dari Dinas Kesehatan Rakyat.

<sup>8</sup> Pusat Penelitian dan Kependudukan Gajah Mada, *op. cit.*, hal. 164-165.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah paling padat penduduk di Kota Surakarta adalah di Kecamatan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari berpenduduk 106.708 jiwa dengan rincian laki-laki 50.985 jiwa dan perempuan 55.723. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Serengan. Kecamatan Serengan berpenduduk 50.359 jiwa dengan rincian laki-laki 23.895 jiwa dan perempuan 26.464 jiwa.

Disamping mempunyai penduduk paling padat, Kecamatan Banjarsari juga mempunyai gelandangan terbanyak, yaitu sebanyak 202 jiwa dengan rincian laki-laki 112 jiwa dan perempuan 90 jiwa. Adapun di daerah lain gelandangan tidak terlalu banyak.<sup>9</sup>

Jumlah penduduk di Surakarta tiap tahunnya mengalami kenaikan. Perbedaan antara angka kelahiran dan angka kematian merupakan pengaruh utamanya. Serta perbedaan jumlah penduduk yang masuk dan keluar Kota Surakarta juga memberikan andil yang cukup besar.

Pertambahan penduduk ini karena tidak dibarengi dengan perluasan wilayah maka secara otomatis akan mengalami kepadatan penduduk yang meningkat. Kenaikan jumlah penduduk tiap tahunnya di Karesidenan Surakarta pada tahun 1950-1955 adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 164-165.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Karesidenan Surakarta 1950-1955**

Tahun	Jiwa	Kelahiran	Prosentase	Kematian	Prosentase
1950	3.223.423	72.352	2.24%	38.012	1.18%
1951	3.112.826	78.951	2.52%	36.875	1.18%
1952	3.393.355	94.816	2.79%	42.345	1.24%
1953	3.435.910	112.486	3.45%	50.887	1.48 %
1954	3.457.181	138.478	4.00%	44.887	1.29%
1955	3.559.257	148.304	4.17%	35.267	029%

Sumber: Laporan Statistik DKR Karesidenan Surakarta tahun 1950-1955

Dari table di atas terlihat bahwa jumlah penduduk di Karesidenan Surakarta tiap tahunnya mengalami kenaikan. Jumlah kematian penduduk hanya mengalami peningkatan dari tahun 1950 sampai 1953, setelah itu sampai dengan tahun 1955 terjadi penurunan.

Laju pertumbuhan penduduk Surakarta rata-rata tiap tahun 1-2 persen. Soengeng Atmosoearso dan Muh Agil Ichsan menyatakan bahwa apabila terdapat pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen digolongkan laju pertumbuhan penduduk rendah, antara 1-2 persen digolongkan laju pertumbuhan penduduk sedang dan apabila lebih dari 2 persen laju pertumbuhan penduduk tergolong tinggi.<sup>10</sup> Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk di Surakarta bisa dikatakan sedang.

Menurut Said Rusli apabila penduduk semakin bertambah maka bertambah pula modal pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Namun bersamaan dengan itu beban pemerintah juga bertambah karena meningkatnya

<sup>10</sup> Soengeng Atmosoearso dan Muh Agil Ichsan, 1980, *Ikhtisar Geografi dan Kependudukan*, Surabaya: IPIEMS, hal. 120.

kebutuhan sandang, pangan dan papan. Disamping itu, masih ada sarana dan prasarana lain yang perlu disediakan oleh pemerintah, misalnya sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

## 2. Keanekaragaman Penduduk

Seperti wilayah lain, Surakarta juga memiliki penduduk yang multietnis. Etnis yang ada di Surakarta antara lain Jawa, Tionghoa, Arab, Belanda, dan banyak lagi lainnya. Adapun mayoritas jumlah penduduk di Surakarta adalah suku Jawa yang berjumlah 330.650 jiwa atau sekitar 90 persen dari total penduduk. Arab sebanyak 4.062 penduduk, Belanda sebesar 199 penduduk, dan lain-lain sekitar 1000 penduduk.<sup>11</sup>

Sebagai wilayah yang terdiri dari banyak etnis, Surakarta memiliki warna interaksi yang unik. Interaksi etnis Jawa dengan Arab tidak memiliki masalah. Etnis Jawa memiliki keterbukaan dan bisa menerima etnis Arab dalam segala aktifitasnya. Akan tetapi berbeda dengan interaksi antara Jawa dan Tionghoa, interaksi antar keduanya sering menimbulkan masalah dan tak jarang berupa bentrokan fisik. Permusuhan dengan etnis Tionghoa mulai muncul sejak tahun 1911 ketika perkelahian kecil antara Rekso Rumecko (Jawa) dengan Keong Sing (Tionghoa).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Daulat Rakyat*, 11 Agustus 1955.

<sup>12</sup> Takashi Shiraishi, 1990, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hal. 55.

### **3. Kondisi Sosial Masyarakat dan Organisasi Islam di Surakarta**

#### **a. Umat Islam Surakarta Pada Masa Awal Kemerdekaan**

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia umumnya memperlihatkan sikap dan kecenderungan yang berbeda dari sebelumnya. Rakyat Indonesia tidak lagi merupakan orang-orang yang pasif seperti pada zaman penjajahan, tetapi cenderung aktif, pasti dan tegas dalam bersikap, dan siap sedia dalam memegang nasib di masa depan di tangan sendiri. Sikap rendah diri lenyap dan berkeyakinan mampu menempatkan diri sederajat dengan bangsa lain di dunia.<sup>13</sup>

Kondisi masyarakat Surakarta, juga memperlihatkan suatu identitas diri, terlihat dari pola pikir, ciri-ciri, sikap dan pandangan tertentu yang terbentuk oleh masa silam, yaitu masa sebelum penjajah datang dan pada masa penjajahan terjadi. Beberapa ciri dan sikap ini tertutup oleh semangat nasionalisme, apalagi pada saat itu terjadi revolusi fisik yang menuntut tindakan serba cepat serta spontan, sehingga identitas diri tersebut akan muncul apabila gelombang revolusi reda.

Bentuk-bentuk dari kondisi tersebut mewujudkan suatu bentuk hubungan antar kelompok dan kepentingan mempertahankan kelompok di dalam masyarakat, sehingga akan memberi pengaruh ke arah mana kehidupan sosial dan politik akan berkembang selanjutnya. Hal ini berlaku juga bagi umat Islam, apabila ditelusuri ciri-ciri ini di kalangan umat dalam hubungannya dengan

---

<sup>13</sup> Deliar Noer, 1982, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta : LP3ES, hal. 1



golongan lain di Indonesia pada masa menjelang merdeka serta masa sesudahnya.<sup>14</sup>

Pada masa kemerdekaan, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, karena ada sekitar 90% orang Indonesia menganut agama Islam. Surakarta sebagai bekas kota kerajaan, banyak mewariskan kebiasaan-kebiasaan pra Islam yaitu pengaruh agama Budha dan Hindu, sehingga agama Islam lebih memeperlihatkan corak tradisional yang kuat. Hal ini terlihat, bahwa umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Kota surakarta, tidak semuanya memegang teguh pada ajaran Islam secara murni dan masih memegang tradisi Jawa seperti halnya mengadakan kegiatan upacara Jawa. Tradisi upacara ini umpamanya sehubungan dengan kelahiran anak, ketika perkawinan atau kematian.<sup>15</sup>

Kehidupan umat islam tetap berjalan seperti halnya panggilan sholat lima kali sehari dengan adzan disertai bedug, telah menjadi kebiasaan tradisional yang tidak asing lagi di masjid-masjid. Peringatan-perngatan Islam pun telah diselenggarakan dengan adanya percampuran dengan tradisi Jawa seperti, upacara Sekaten untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW (Maulud Nabi), Peringatan Idul Adha dan Idul Fitri dengan halal bihalal (sungkeman) yang sejak masa penjajahan Belanda aktifitas ini telah dilakukan. Masa bepergian naik haji telah menjadi kewajiban umat Islam dan dipandang masyarakat sebagai kenaikan status sosial bagi orang yang melakukannya. Penentuan seseorang bisa masuk Islam adalah pengakuan individu dan penerimaan umat terhadapnya dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>15</sup> Mohammad Nasih, 2006, *Dinamika Antara Islam dan Nasionalisme*, Jakarta : Pelita.  
Hal.4

menjalankan syarat-syarat yang ringan dengan pengakuan dua kalimat syahadat. Ciri khusus yang lain adalah pantang makan makanan yang dilarang ajaran Islam. Khitan atau sunat yang sudah terbiasa bagi umat Islam di Surakarta merupakan pengakuan masyarakat terhadap pengislaman seorang anak.<sup>16</sup>

Luwesnya ajaran Islam ini dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, norma-norma etika dan moral, yang tidak bertentangan dapat dibiarkan atau ditoleransi, dalam batas-batas tertentu berangsur-angsur masuk menjadi bagian tradisi Jawa. Kenduri atau Selamatan yang memang berasal dari masa sebelum Islam tiba, dalam lingkungan umat diteruskan juga, karena dari pandangan Islam kegiatan ini mempunyai arti agama dan sosial sesuai ajaran agama. Hal ini berfungsi juga sebagai cara untuk menghimbau orang beriman kepada Allah SWT, serta memperkuat ikatannya kepada sesama manusia. Makna selamatan sendiri harus sesuai dengan ajaran agama, doa di dalamnya tidak ditujukan kepada arwah dan semangat, melainkan kepada Allah SWT. Ucapan doa bersih dari syirik yang mempersukutkan Tuhan dan diucapkan dalam bahasa Arab dengan menggunakan ajaran Islam.<sup>17</sup>

Umat Islam dalam menjalankan ajaran agama menumbuhkan semangat nasionalisme pada masa kemerdekaan. Gejala kemajuan mulai nampak seiring dengan lunturnya pengaruh tradisi pra Islam dan pudarnya kekuatan legitimasi keraton sebagai pusat budaya baik Kasunanan maupun Mangkunegaraan di Surakarta dalam mengatur rakyat di daerah kekuasaannya diganti dengan semangat nasionalisme. Selain karena dalam perjalanan sejarahnya adanya

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 3

pengaruh kekuasaan penjajahan baik Belanda maupun Jepang, juga pada awal abad XX telah lahir kebangkitan Islam akibat perkembangan pendidikan yang dilakukan oleh para reformis Islam, yang meletakkan kembali ajaran Islam secara murni. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya suatu revolusi sosial yang terjadi di Surakarta pada tahun 1947, yang menunjukkan bahwa mobilitas sosial yang tinggi mengakibatkan daerah ini dicabut sebagai daerah Istimewa.<sup>18</sup>

Dapat dikatakan bahwa dalam tinjauan sistem sosial masyarakat Surakarta pada pelapisan masyarakat telah berubah. Pelapisan masyarakat Surakarta yang tersusun secara hirarkis dimana raja menduduki tempat tertinggi kemudian diikuti oleh kaum bangsawan, lalu golongan priyayi dan akhirnya golongan di luar kelompok tersebut yang berkedudukan paling bawah dinamakan "wong cilik", telah mulai kabur.

Setelah kemerdekaan dapat dijumpai masyarakat Islam yang menjadi golongan elite dalam masyarakat berkecimpung di dalam bidang ekonomi, sosial, dan lebih menyolok dalam bidang politik, sehingga tidak mengherankan apabila pada masa-masa awal kemerdekaan banyak partai Islam tumbuh dan berkembang ikut menentukan nasib negara Indonesia yang berdaulat. Walau pada masa awal kemerdekaan masih disibukkan oleh perang revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan oleh seluruh rakyat Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Savitri Prastiti Scherer, 1985, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, Jakarta : Sinar Harapan, hal. 69  
*commit to user*

<sup>19</sup> Deliar Noer, *Op. Cit.*, hal. 5

## b. Perkembangan Pendidikan dan Organisasi Islam di Surakarta

Politik kolonial Belanda pada awalnya tidak menaruh kepercayaan kepada Islam sebagai kekuatan yg dapat membawa kemajuan. Islam hanya dapat menerima pemerintah asing secara terpaksa beserta suatu koeksistensi di antara penguasa Kristen dan warga Muslim, dengan demikian tidak mungkin dikembangkan suatu hubungan kekal antara rakyat Indonesia dan negeri Belanda.<sup>20</sup>

Pemikiran politik kolonial Belanda bahwa Indonesia harus mengalami perubahan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang modern yang dapat terwujud menjadi masyarakat yang telah di westernisasikan. Berdasarkan gagasan pokok ini penguasa kolonial mempunyai tanggung jawab moral untuk menjalankan budaya barat. Dalam hubungan ini kaum aristokrat Indonesia perlu diajak ikut serta dalam kehidupan sosial dan budaya Barat.<sup>21</sup>

Dalam usaha untuk melapangkan jalan ke arah asosiasi, pengajaran Barat merupakan alat utama untuk melancarkan proses modernisasi dan menyisihkan hambatan dari kekuatan tradisional. Sementara itu golongan Kristen beranggapan bahwa usaha untuk memindahkan buah budaya Barat tanpa menanamkan akarnya akan mengalami kegagalan. Pada umumnya politik etis mendapat dukungan luas, tidak lain karena cita-cita dan tujuan yang termuat di dalamnya berjalan sejajar dengan politik Kristen, sehingga kaum etis yang bergerak dalam bidang

---

<sup>20</sup> Marwati Djoened, Nugroho Notokusanto, 1990, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 74

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 67

pengajaran dalam lembaga pendidikan Kristen mendapat dukungan dan bantuan dari organisasi-organisasi keagamaan dari negeri Belanda.<sup>22</sup>

Keadaan ini membuat kaum reformis Islam menjadi khawatir akan kemunduran Islam, rasa tidak puas dalam bidang pendidikan yang berbasas Islam. Hal ini merupakan salah satu latar belakang perlawanan mereka terhadap kolonial Belanda agar nantinya pendidikan yang berbasas Islam ini menghasilkan lulusan yang bisa berpikir kritis mampu berkiprah dalam kemerdekaan kaumnya.<sup>23</sup>

Lembaga pendidikan yang berobyek pada sekolah tidaklah begitu asing dalam tradisi Indonesia. Pesantren, madrasah, surau dan berbagai sekolah agama yang sudah lama dikenal merupakan jenis sekolah yang coraknya bertolak belakang dengan sekolah yang diperkenalkan pemerintah kolonial. Bak dari sisi sudut pengajaran, cara pendidikan maupun dari kemungkinan yang bisa diharapkan oleh anak didik untuk mendapat pekerjaan. Sejak tahun 1920 setapak demi setapak telah mulai ada perubahan dari beberapa pesantren dan madrasah yang umumnya digerakkan oleh kaum reformis Islam. Sekolah agama yang didirikan oleh golongan ini mulai memakai sistem baru dan memperkenalkan berbagai macam jenis pengajaran umum.<sup>24</sup>

Sekolah umum swasta yang dikelola oleh para reformis Islam pada dasarnya bisa dibedakan antara yang mengikuti sejauh mungkin corak serta sifat dari sekolah pemerintah dan bersubsidi yang dengan sadar mempunyai azas,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 75

<sup>23</sup> Fazlur Rahman, 1985, *Gerakan Pembaharuan Islam di Tengah Tantangan Dewasa Ini*, Jakarta: Yayasan Obor, hal. 28

<sup>24</sup> M. Said, 1981, *Pendidikan Abad ke Dua Puluh Dengan Latar Belakangnya*, Jakarta: Mutiara, hal. 23



tujuan yang lain. Dasar dan tujuan ini memberi warna pada ideologis bagi sekolah, mengikuti ajaran pendidikan Islam, memberi corak pendidikan baru, sampai dengan kursus berorganisasi.

Sekolah swasta yang tidak bersubsidi mendapat perhatian khusus dari pemerintah kolonial karena akan menjadi potensi perlawanan terhadap pemerintah. Sekolah Liar atau "Wilde School" lebih bercorak anti pemerintah dan dalam perkembangannya mengalami pasang surut karena tidak terikat pada organisasi yang besar. Sekolah-sekolah ini tergantung pada situasi dan kondisi dari faktor intern maupun ekstern.<sup>25</sup>

Berikut adalah sekolah Islam di Surakarta baik yang bersubsidi maupun yang tidak sampai kemerdekaan Indonesia :

### **1. Sekolah-sekolah Muhammadiyah**

Organisasi Islam Muhammadiyah mempunyai sifat reformis dan non politik dan kegiatannya terpusat pada bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial yang lain. Sikapnya terhadap sistem pendidikan barat tidak menolak karena Muhammadiyah berpandangan bahwa untuk mencapai tujuan kemerdekaan umat adalah dengan jalan memodernkan masyarakat Indonesia, namun tidak dengan haluan politik kolonial. Maka sistem organisasi ini lebih banyak mengambil alih sistem pengajaran dan dari segi sosial lainnya, sehingga pemerintah memberi subsidi pada organisasi ini meskipun tidak menjalankan kegiatan politik, pengaruh reformisnya disalurkan lewat pengajaran modern.

Organisasi Muhammadiyah umumnya dalam melakukan kegiatan dengan tindakan yang bijaksana tanpa mengundang perlawanan keras. Berusaha agar

---

<sup>25</sup> Marwati Djoened, Nugroho Notokusanto, 1990, Jakarta : Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 80.



tidak melancarkan serangan atau celaan yang keras terhadap kebiasaan dan praktek yang berlawanan dengan ajaran pokok Islam, jalan edukatif dan persuasif lebih merupakan ciri organisasi ini. Pada umumnya kalangan ini lebih bersikap toleran terhadap lingkungan, walaupun secara intern mereka melakukan disiplin yang ketat. Kesediaan organisasi ini menerima subsidi (tetep bersikap tidak memihak pemerintah kolonial) dalam menyelenggarakan pendidikan dapat dilihat secara kritis dan sinis oleh banyak pihak, termasuk kalangan nasionalis yang netral agama dan dalam kalangan Islam sendiri, terutama kalangan Islam tradisional.<sup>26</sup>

Gerakan Muhammadiyah pertama kali muncul di daerah Yogyakarta pada tahun 1912 di bawah pimpinan KH. Ahmad Dahlan. Bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam agar terwujud masyarakat Indonesia yang modern dan merdeka dengan salah satu usahanya adalah dalam bidang pendidikan. Gerakan ini mendapat dukungan dari masyarakat luas, serta tokoh agama yang berpikiran modern, sehingga dalam waktu singkat telah banyak berdiri cabang-cabang Muhammadiyah di daerah.<sup>27</sup>

Pergerakan Muhammadiyah cabang Surakarta berdiri sejak tahun 1923, merupakan perubahan dari Sidik, Amanat, Tabligh, Fatonah (SATF). Setelah itu disusul dengan munculnya kursus-kursus untuk pendidikan murid dengan nama Siswa Pradja yang kemudian pada tahun 1931 diubah menjadi Nasyiatul Aisyiah. Pada tahun 1929 Muhammadiyah cabang Surakarta mendirikan Wustha Muhammadiyah di jalan Notokusuman Solo. Sedang usaha-usaha Aisyiah dalam bidang pendidikan antara lain, His Putri, Nederlandsch Aisyiah School,

---

<sup>26</sup> Deliar Noer, *op. cit.*, hal. 12

<sup>27</sup> M.Said, *Op. Cit.*, hal. 50

Huishoudschool Aisyiah dan pada tahun 1932 didirikan madrasah Busthanul arthfall untuk tingkat Taman Kanak-Kanak. Muhammadiyah juga menyeenggarakan pendidikan Volkshool, Stndart School, Schakel School, HIS dan lain-lain.<sup>28</sup>

Di Surakarta pada tahun 1930 jumlah sekolah yang dikelola Muhammadiyah ada sekitar 10 buah, yang sebagian besar terdiri dari *Standaard School* dan tersebar di daerah Mangkunegaran, Notokusuman, Kleco, Kampung Sewu, Kauman, Serengan, dan Pasar Legi. Pada masa kemerdekaan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sekolah agama, meliputi Madrasah Bustanul Athfal (TK), Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Muallimin dan Muamilat dan kemudian didirikan Akademi Tabligh. Sedang sekolah umum meliputi, sekolah umum dari TK hingga Perguruan Tinggi, sekolah kejuruan dari berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2. Perguruan Al-Islam

Ideologi yang dibawa perguruan Al-Islam adalah dengan memajukan pendidikan Islam dengan menggunakan sistem pendidikan yang bersifat ilmu pengetahuan umum dan Ilmu Agama. Pendidikan pada perguruan Al-Islam berusaha mempersatukan aliran-aliran dalam Islam dengan tidak mengakuai adanya mahzab, dan menjadikan Islam sebagai agama modern yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk

---

<sup>28</sup> Sutrisno Kutojo, *Haji Samanhudi*, Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, hal. 77

gerakan Pan Islamisme , dan berusaha menyelenggarakan Al-Islam Kongres atau pertemuan dari kalangan tokoh umat Islam.

Kelahiran Al-Islam yang bermula dari kelompok pengajian di kampung Jamsaren Surakarta pada tahun 1926, muncul sebagai akibat ketidakpuasan mereka terhadap sistem pendidikan kolonial yang dualistis dan mempunyai sifat sekuler. Selain itu Al-Islam ingin menjembatani sistem pendidikan tradisional dan modern yang telah memicu perpecahan di kalangan umat Islam.

Perguruan Al-Islam terhadap pemerintah kolonial Belanda bersikap non kooperatif sehingga tidak mendapat subsidi bagi proyek-proyek sekolahnya. Usaha yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan pendidikan dan pengajaran yang dapat membuka akal pikiran siswa didiknya, memandang Islam di Indonesia sebagai kekuatan yang utuh sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat kaumnya, sehingga jalan stu-satunya yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan suatu persatuan di kalangan umat Islam, yang pada masa awal kelahirannya perpecahan ini sudah meruncing pada tingkat yang mengkhawatirkan antara golongan modernis dan tradisional.<sup>29</sup>

### **3. Mambaul Ulum Kasunanan Surakarta**

Pada awal abad XX perkembangan kerajaan di Vorstenlanden memerlukan perubahan di bidang pendidikan, angkutan umum, komunikasi dan administrasi, sebab pembangunan bidang-bidang tersebut sangat tertinggal jauh di bandingkan dengan daerah-daerah lain yang diperintah langsung leh pemerintah kolonial. Berkat anjuran dan bantuan pemerintah kolonial, maka pihak kerajaan kemudian

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 80

mengadakan perubahan dan perbaikan dalam bidang-bidang tersebut. Khusus dalam bidang pendidikan pendidikan, pemerintah memberikan wewenang kepada pihak kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran untuk menyelenggarakan dan mengelola sendiri lembaga pendidikannya.

Susuhunan Paku Buwono X mengusahakan penyelenggaraan sekolah sendiri mulai tanggal 1 November 1910 dengan didirikannya HIS Kasatriyan yang kemudian disusul dengan Froberschool Phamardi Siwi pada tanggal 26 Agustus 1926, serta terakhir adalah didirikannya HIS Pharmadi Putri pada tanggal 1 Juli 1927 sekolah-sekolah tersebut menggunakan sistem pendidikan barat.( Kabar Paprentahan, 1932, hal 44, Milik Keraton Kasunanan Surakarta)

Jenis pendidikan lainnya adalah pendidikan berdasarkan budaya timur atau "Oorstech Lager Onderwijs", di kalangan umum jenis pendidikan ini dikenal dengan nama Sekolah Desa (Volkschool), dengan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Jawa, adapun lama pendidikan selama 3 tahun.<sup>30</sup>

Selain sekolah desa juga diselenggarakan sekolah-sekolah yang berazaskan agama Islam dengan nama Mambaul Ulum (MU) yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1905 ( kabar Paprentahan, 1932, hal 44, Milik kEraton Kasunanan Surakarta). Hal ini menunjukkan pada masa itu pengaruh Islam telah mencapai pada tingkat kerajaan, di mana pendidikan agama mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah kerajaan. Pertimbangan pemerintah Kasunanan ada sebgai penganut Islam, tidak rela apabila Islam punah akibat majunya pendidikan barat, yang dapat melunturkan keimanan seorang muslim. Paku Buwono X memberi perhatian yang besar kepada rakyat di daerah Kasunanan adalah

---

<sup>30</sup> M.Said, *Op. Cit.*, hal. 47 *commit to user*

penganut agama Islam, sehingga sekolah ini dapat menjadi pelayanan mereka terhadap kebutuhan rakyatnya.

Maksud dan tujuan utama dengan didirikannya sekolah Mambaul Ulum adalah:; pertama, untuk membentuk kader-kader ulama sebagai corong dakwah rakyat dengan ajaran Islam yang diakui sebagai ajaran yang baik masyarakat berbangsa. Tujuan kedua untuk mendidik calon pejabat agama yang ahli dan cakap dalam menjalankan tugasnya, seperti halnya tugas sebagai naib pernikahan dan ahli dalam hukum-hukum agama. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan pada sekolah tersebut adalah 11 tahun.<sup>31</sup>

#### **4. Cokroaminoto**

Perkembangan Sarekat Islam dalam bidang pendidikan dan pengajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan organisasinya. SI pada permulaan perkembangannya merupakan organisasi yang bersifat nasional, namun bentuk organisasi yang bersidang kerakyatan ini didirikan atas SI lokal di daerah-daerah yang merupakan cabang dari induk SI. SI lokal mempunyai corak yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga mengakibatkan kurang adanya koordinasi dari SI pusat, maka dalam bidang pendidikan mempunyai corak sendiri-sendiri menurut garis perjuangan SI lokal. Hal ini dapat dilihat pada waktu proses terjadinya perpecahan dalam tubuh SI pada dekade tahun 20-an, yang juga memengaruhi orientasi lembaga pendidikannya. SI lokal yang beraliran komunis dinyatakan sebagai naungan PKI dengan memakai nama Sarekat Rakyat untuk

---

<sup>31</sup> Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto, *Op. Cit.*, hal. 94



membedakan Sarikat Islam yang beraliran agamis, selanjutnya Sarekat Rakyat ditetapkan sebagai "Onderbouw PKI".<sup>32</sup>

Dinamika sosial masyarakat Surakarta cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari munculnya beberapa gerakan radikal, baik yang berwarna lokal maupun nasional sering muncul dan diawali di Surakarta.<sup>33</sup>

Dalam perspektif sejarah munculnya radikalisme di Surakarta telah dimulai sejak awal berdirinya partai-partai politik di Surakarta, misalnya Sarekat Islam (SI), yang mulai tumbuh dan menguat pada tahun 1920 dan dipelopori oleh dua tokoh radikal yaitu H. Misbach dan Tjiptomangoenkoesoemo. Pada posisi yang lain gerakan keagamaan seperti fundamentalis Islam memiliki akar sejarah yang kuat di Surakarta.

Sarekat Islam (SI) adalah tonggak awal gerakan sosial politik di Indonesia yang memiliki perspektif yang maju. Tonggak politik yang penting tersebut telah dimulai sejak tahun 1918. Beberapa persoalan yang bermotifkan ekonomi seperti persaingan dagang antara pedagang kain pribumi, etnis Cina, dan etnis Arab telah mendorong berdirinya SI. SI berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan Budi Utomo arena gerakan SI lebih bersifat terbuka dalam hal keanggotaan. Sehingga bukan hal aneh bila SI memiliki keanggotaan yang majemuk dari beberapa strata dalam masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> A.K Pringgodigdo, 1980, *Sejarah pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, hal.36-37

<sup>33</sup> Tentang berbagai peristiwa yang pernah terjadi di Surakarta dapat dibaca dalam: TIM LPTP, 1999, *Runtuhnya Kekuasaan Keraton Alit*, Solo: HAS Central Grafika, khususnya bab 3.

<sup>34</sup> Muh. Muhson Nurul Khawari, 2003, *Gerakan Mahasiswa Kiri Di Solo*. SKRIPSI Jurusan Sejarah FSSR UNS. hal. 39.



Meskipun corak komunisme di Solo yang dekat kepada Islam. Bukan berarti lepas dari serangan Islam. Muhammdiyah misalnya, pernah mengikrarkan secara terbuka bahwa, Islam dan Komunis tidak sesuai, dan oleh sebab itu seorang muslim sejati tidak akan menjadi anggota PKI. Pertentangan seperti itu terus diikuti dan menjadi pertentangan berkepanjangan hingga generasi penerusnya. Namun agitasi dan pengaruh Misbach dan tokoh-tokoh Islam yang menyeberang ke komunis seperti Tjipto dan Marco sanggup untuk menarik perhatian rakyat Solo sehingga gerakan ini semakin meluas ke pedalaman Solo. Komunisme yang berkembang di Solo adalah perpaduan antara Islam, ide komunisme dan abangan.<sup>35</sup>

Melihat historis pembangunan gerakan kiri di Solo yang memiliki tingkat mobilitas organisasi yang cukup tinggi, sehingga tidak mengherankan bila PKI di Solo memiliki kekuatan yang signifikan pada masa tahun pemerintahan Soekarno. Partai Komunis Indonesia (PKI) memperoleh suara yang cukup besar pada tahun 1955. Kedudukannya bisa disejajarkan dengan PNI, PNU, dan Masyumi. Di pemilihan umum tahun 1955, perolehan suara di Solo mencapai jumlah 70.808 dari 123.653 suara yang sah atau mencapai 57,26%. Perolehan ini membawa PKI menduduki urutan teratas kemudian di ikuti oleh PNI dengan memperoleh 37.144 suara atau mencapai 30%, selanjutnya Masyumi dengan perolehan suara mencapai 13.733 suara atau 11,10% dan yang terkecil adalah PNU yang hanya memperoleh 1998 atau kurang dari 2% dari jumlah suara yang sah. Dari latar belakang historis inilah Surakarta menjadi salah satu basis Partai

---

<sup>35</sup> Nor Hiqmah. 2000. *H M Misbach Sosok dan Kontroversi Pemikirannya*. Yogyakarta: Yayasan Lentera Indonesia. hal. 17.

Komunis yang cukup kuat pada tahun 1965 dengan dukungan organisasi massanya.<sup>36</sup>

Basis massa PKI pada masa itu adalah di daerah Karanganyar dengan bupati Drs. Harun Al Rasyid, Boyolali dengan bupati Suadi dan Surakarta dengan walikotanya Utomo Ramelan. Tiga wilayah Surakarta tersebut merupakan basis utama pertahanan PKI, setelah terjadinya peristiwa 1965. Para pengikut PKI yang masih selamat kemudian melakukan perang gerilya di seputar wilayah tersebut, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Merapi Merbabu Kompleks (MMC).<sup>37</sup>

## **B. Kondisi Politik Kota Surakarta**

### **1. Ringkasan Politik Awal Kota Surakarta**

Dalam sejarahnya, Surakarta menjadi kota penting sejak Pakubuwono II memindahkan keratonnya ke desa Sala. Keraton lama di Kartasura telah rusak akibat serangan dari laskar pemberontak Cina yang dipimpin oleh Sunan Kuning pada 30 Juni 1742. Hal ini diawali oleh kejadian Geger Pecinan di Batavia yaitu pemberontakan orang-orang Cina yang melawan kekuasaan Belanda. Pemberontakan ini kemudian merembet ke Keraton Kertasura. Mereka menggempur keraton tersebut karena kerajaan Jawa ini dianggap sebagai boneka Belanda. Sunan Kuning yang memimpin penyerbuan ke keraton Kertasura

---

<sup>36</sup> Tercatat bahwa dukungan massa Partai Komunis di daerah ini mencapai angka 80%, hal ini terkait dengan kondisi rakyat yang minus jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, selanjutnya lihat: Pusat Penerangan Angkatan Darat. 1966. *Fakta-fakta Persoalan Sekitar Gerakan 30 September*. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 140.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal 237.

akhirnya juga dibantu oleh R.M Said (Pengeran Sember Nyawa) yaitu seorang bangsawan keraton dalam melawan Belanda.

Setelah keraton Kertasura rusak, Pakubuwono II mulai mencari tempat baru lagi untuk membangun keratonnya yang baru. Akhirnya terpilihlah desa Sala. Desa Sala terpilih karena di sana merupakan daerah pertemuan Sungai Pepe dan Sungai Bengawan Sala sehingga bermanfaat dari segi ekonomi, sosial, politik, dan militer. Faktor lainnya yaitu di desa Sala telah berupa perkampungan sehingga lebih efisien untuk dibangun tanpa harus membatat hutan.<sup>38</sup> Disanalah dibangunnya keraton yang baru yaitu Keraton Surakarta.

Dua hari setelah kemerdekaan RI yaitu tanggal 19 Agustus 1945, Surakarta diberi status swapraja. Raja Surakarta diberi kekuasaan otonom atas daerahnya. Tetapi, kekuasaan otonom tersebut ditentang oleh rakyat. Protes rakyat Surakarta itu akhirnya diakomodasi oleh pemerintah pusat dengan penghapusan Swapraja Surakarta.<sup>39</sup>

Gerakan anti swapraja ini tidak hanya muncul di kalangan masyarakat saja tetapi juga tumbuh di lingkungan pegawai swapraja. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan pegawai-pegawai terhadap pembesar-pembesar pemerintahan swapraja.<sup>40</sup>

PKI juga melakukan gerakan yang sama dalam mendukung rakyat untuk melakukan gerakan anti swapraja tersebut. Hal ini dikarenakan pada

---

<sup>38</sup> Muh. Hari Mulyadi dkk, 1999, *Runtuhnya Kekuasaan Keraton Alit Studi Radikalisasi Sosial Wong Solo dan Kerusuhan Mei 1998*, hal. 13.

<sup>39</sup> Benedict Anderson, 1988, *Revolusi Pemoeda Penduduk Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1945*, Jakarta: Sinar Harapan, hal. 138.

<sup>40</sup> Pemerintah Kota Surakarta, 2001, *Mosaik Otonomi Daerah Menuju Kota Surakarta yang Mandiri dan Berbudaya*, Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta, hal. 16.

perkembangannya masyarakat akan menuju ke arah demokrasi. Selain itu, PKI juga menjadi penyalur aspirasi rakyat dalam gerakannya untuk mendapatkan massa.<sup>41</sup>

## 2. Kota Surakarta Sebagai Basis Politik PKI

Surakarta dijadikan basis politik oleh beberapa organisasi politik dan kepartaian, dalam hal ini PKI merupakan salah satu organisasi politik yang mempunyai basis besar di sini. Salah satu tokoh komunis yang tidak bisa dilupakan adalah Amir Sjarifuddin, yang merupakan tokoh komunis Indonesia bertaraf nasional. Ia banyak bergerak mengembangkan sayap dan melakukan konsolidasi dengan kelompok sosialis di bawah Sjahrir. Seperti kaum muda komunis yang menerapkan strategi, bahwa Amir juga memperhitungkan kekuatan partai sambil menyusun kekuatan. Karena untuk bergerak secara legal dan terang-terangan Amir meragukan kekuatan PKI. Dalam waktu singkat Amir Sjarifuddin berhasil memperoleh dukungan yang hebat, sampai-sampai Sjahrir merasa tersisihkan dan kemudian Sjahrir keluar dari Partai Sosialis dan membentuk partai baru yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sehingga pantas Amir disebut sebagai pemimpin golongan kiri.<sup>42</sup>

Keluarnya Sjahrir dari Partai Sosialis di satu pihak menguntungkan, tetapi di lain pihak sangat merugikan Amir sendiri, karena anggota-anggota KNIP dan BPKNIP banyak memihak Sjahrir, meskipun sebagian besar massa anggotanya

---

<sup>41</sup> Arsip AD, TERR.IV/DEVISI DIPONEGORO SUB TERR.XV. RES. INF.54. Laporan Khusus No.039/LC/B.II/15-1/54, *Sekitar Swapraja*. Arsip tersimpan di Perpustakaan Musium Mandala Bhakti Semarang.

<sup>42</sup> Maksum et al. 1990. *Lubang-Lubang Pembantaian; Petualangan PKI di Madiun*. Jakarta: Grafiti, hal. 1-2.

banyak mendukung Amir, termasuk Pesindo. Untuk memperkuat kedudukannya, pada 26 Februari 1948 di Solo, Amir Sjarifuddin membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang mempersatukan Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia (PBI), PKI, Pesindo, dan Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan RI). Amir dengan FDR-nya menjadi kelompok oposisi bagi Pemerintahan Hatta, yang menuntut pembubaran Kabinet Hatta dan segera dibentuk kabinet parlementer dimana wakil-wakil FDR diikutsertakan dengan menduduki kursi-kursi penting. Tentu pengajuan ini ditolak mentah-mentah oleh Hatta, sehingga Amir sedikit terpuak dari penolakan tersebut.<sup>43</sup>

Dengan oposisi terhadap Kabinet Presidensial Hatta yang berasal dari golongan Partai Sosialis Amir Syarifudin, PKI dan golongan kiri lainnya. Semuanya tergabung dalam FDR (Front Demokrasi Rakyat). Kekuatan FDR berpusat di Surakarta. FDR sendiri akhirnya berfusi dengan PKI. FDR menghendaki adanya angkatan perang revolusioner dengan pendirian sosialisme yang jelas. Sedangkan pemerintah menghendaki angkatan bersenjata yang profesional. Namun terjadi perpecahan di Surakarta. Antara yang pro dengan FDR dan yang pro dengan pemerintah. Akhirnya golongan yang pro FDR mundur dari kota Surakarta ke Madiun dan disana mereka membentuk pemerintahan baru.<sup>44</sup>

Hasil Pemilu tahun 1955 dapat mencerminkan kekuatan riil partai politik di Surakarta. Jika secara nasional terdapat empat (4) partai besar yang memenangkan Pemilu yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi,

---

<sup>43</sup> G. Moedjanto. 1989, *Sejarah Indonesia Abad ke 20 Jilid I Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 31.

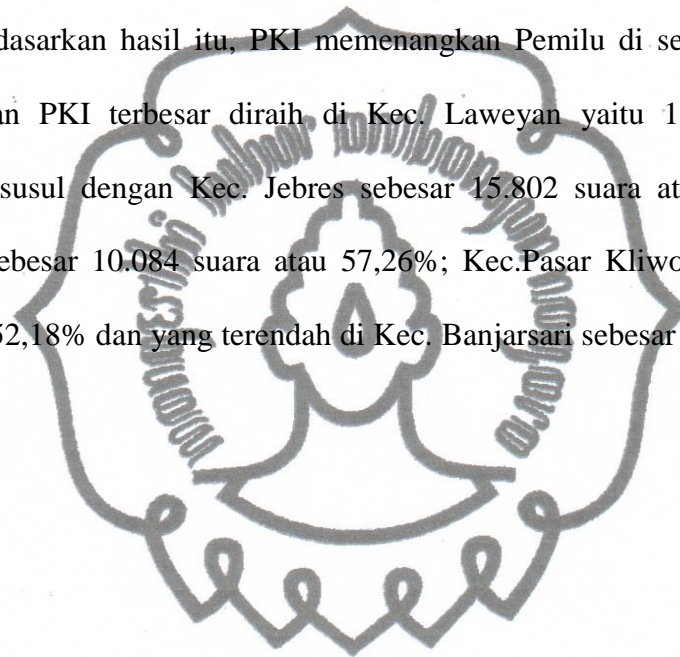
<sup>44</sup> Onghokham, 1983, *Rakyat dan Negara*, Jakarta: LP3ES, hal. 158.



Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), maka di Surakarta tidak jauh berbeda.

Dari 123.653 suara yang sah, PKI memperoleh 70.808 suara atau 57,26%. Disusul dengan PNI yang mendapatkan 37,144 suara atau sekitar 30% lebih, sedangkan Masyumi mendapatkan 13.733 suara atau sekitar 11,10% dan yang terkecil NU hanya memperoleh 1.998 suara atau 1,61%.

Berdasarkan hasil itu, PKI memenangkan Pemilu di seluruh kecamatan. Kemenangan PKI terbesar diraih di Kec. Laweyan yaitu 16.935 suara atau 67,48%; disusul dengan Kec. Jebres sebesar 15.802 suara atau 65,48%; Kec. Serengan sebesar 10.084 suara atau 57,26%; Kec. Pasar Kliwon sebesar 12.143 suara atau 52,18% dan yang terendah di Kec. Banjarsari sebesar 15.856 suara atau 47,05%.





## BAB III

### KONGRES HMI KE-VIII TAHUN 1966 DI SURAKARTA

#### A. Sejarah Singkat HMI

Dalam rilis resminya di salah satu situs HMI<sup>1</sup>, HMI membagi menjadi empat faktor yang melatarbelakangi berdirinya HMI. Yang pertama adalah situasi dunia internasional. Pada saat itu munculah apa yang dinamakan gerakan pembaruan. Gerakan ini ingin menentang keterbatasan seseorang melaksanakan ajaran Islam secara benar dan utuh. Gerakan ini ingin mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang totalitas, yaitu bahwa Islam bukan hanya terbatas pada hal-hal yang sakral saja, melainkan juga merupakan pola kehidupan manusia secara keseluruhan. Gerakan ini muncul dikarenakan umat Islam yang mengalami kemunduran. Kemunduran umat Islam diawali dengan kemunduran berpikir. Bahkan menutup sama sekali kesempatan untuk berpikir. Sasaran gerakan pembaruan Islam adalah mengembalikan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yang berpedoman pada Alquran dan Hadist Rasulullah SAW.

Gerakan pembaruan ini sudah dimulai lebih dahulu di Turki tahun 1720 dan Mesir tahun 1807. Penganjur-penganjur gerakan pembaruan ini juga banyak bermunculan seperti Rifaah Badawi Ath Tahtawi (1801-1873), Muhammad Abduh (1849-1905), Muhammad Ibnu Abdul Wahab (Wahabisme) di Saudi Arabia (1703-1787), Sayyid Ahmad Khan di India (1817-1898), Muhammad Iqbal di Pakistan (1876-1938) dan lain-lain. Kemudian juga terdapat beberapa tokoh pembaruan yang

---

<sup>1</sup> Dapat dilihat di <http://www.pbhmi.com>, dan beberapa HMI cabang dan komisariat di beberapa daerah juga memiliki websitenya masing-masing.

sudah cukup dikenal, yaitu Ahmad Wahib, Djohan Efendi dan Ketua Umum HMI yang terpilih pada Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 Surakarta ini yaitu Nurcholis Madjid.

Kedua adalah situasi Indonesia, Imprealisme Barat (Belanda) selama  $\pm$  350 tahun berdampak paling tidak tiga hal yaitu, penjajahan itu sendiri dengan berbagai bentuk implikasinya, misi dan zending agama kristiani, dan peradaban Barat dengan ciri sekularisme dan liberalismenya. Dampak-dampak inilah yang ingin coba dibenahi dengan didirikannya HMI. Ketiga adalah kondisi umat Islam di Indonesia. HMI mempunyai anggapan bahwa umat Islam di Indonesia terbagi menjadi empat golongan. Golongan pertama adalah umat yang melakukan ajaran Islam sebagai kewajiban yang diadatkan seperti perkawinan, kematian serta kelahiran. Golongan kedua adalah golongan yang mengenal dan mempraktekkan ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Golongan ketiga adalah golongan yang terpengaruh oleh mistikisme yang menyebabkan mereka berpendirian bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja. Golongan keempat adalah golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, selaras dengan wujud dan hakekat agama Islam. Mereka (HMI) berupaya agar agama Islam itu benar-benar dapat dipraktekkan di dalam masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Keempat adalah kondisi perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. Pada saat itu, sebelum HMI berdiri, ada dua faktor yang dirasakan sangat dominan mewarnai kondisi perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. Pertama yaitu sistem pendidikan yang diterapkan terutama di perguruan tinggi adalah sistem pendidikan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, lebih jauh lihat pada <http://www.pbhmi.net/>, dan <http://www.pbhmi.org/>.

Barat yang mengarah pada sekulerisme. Hal ini diyakini dapat mendangkalkan agama disetiap aspek kehidupan manusia. Kedua yaitu adanya Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta di Yogyakarta dan Serikat Mahasiswa Indonesia di Surakarta. Dan kedua organisasi tersebut berada di bawah pengaruh komunis. Gabungan kedua paham tersebut (sekuler dan komunis) menyebabkan timbulnya krisis keseimbangan. Diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat yang timpang secara tajam dan tidak adanya keselarasan antara akal dan kalbu serta jasmani dan rohani.

HMI sendiri resmi berdiri pada 5 Februari 1947. Diprakarsai oleh seorang mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam) Yogyakarta yang sekarang bernama UII (Universitas Islam Indonesia) bernama Lafran Pane melalui rapat dadakan yang tanpa undangan disalah satu ruangan kuliah STI di Jalan Setiodiningratan (sekarang Panembahan Senopati) dengan menggunakan jam kuliah Tafsir.

Kongres HMI ke-VIII merupakan kongres setelah HMI melewati salah satu fase terpenting dalam perkembangannya yaitu Fase Tantangan (1964-1965). Pada fase ini HMI dianggap oleh PKI sebagai kekuatan ketiga umat Islam setelah Masyumi dan GPII berhasil dibubarkan. Oleh karena itu HMI juga menjadi salah satu sorotan utama dalam berbagai aksi-aksi yang dilancarkan PKI.

## **B. Arti Politis Dan Strategis Kongres HMI ke-VIII Tahun 1966 di Surakarta**

Sejak awal tahun 1966, persiapan Kongres HMI ke-VIII sudah dimulai. Kongres ini semestinya dilaksanakan pada tahun 1965. Tetapi keadaan pada saat itu tidak memungkinkan. Di mana telah terjadi peristiwa penculikan terhadap beberapa pimpinan teras TNI AD yang secara keseluruhan membawa kegoncangan sosial politik di dalam negeri. Akhirnya setelah situasi memungkinkan di tahun 1966 Kongres HMI dapat dilaksanakan. Kongres ini dapat dikatakan sangat istimewa bila dilihat dari segi pemilihan tempat kongres, yaitu Kota Surakarta. Bagi HMI dan mungkin juga dari segi perjuangan Orde Baru, pemilihan Kota Surakarta mempunyai arti yang penting. Surakarta merupakan kota yang dikenal sebagai kota PKI. Dengan berlangsungnya Kongres HMI ke-VIII tahun 1966 di Kota Surakarta, maka ada gambaran yang memutar kenyataan sejarah. Kota Surakarta yang dikenal sebagai basis komunis, akan menjadi tuan rumah kongres sebuah organisasi mahasiswa yang anti komunis. Kongres ini dianggap HMI dapat mengakhiri keperkasaan PKI di Kota Surakarta.<sup>3</sup>

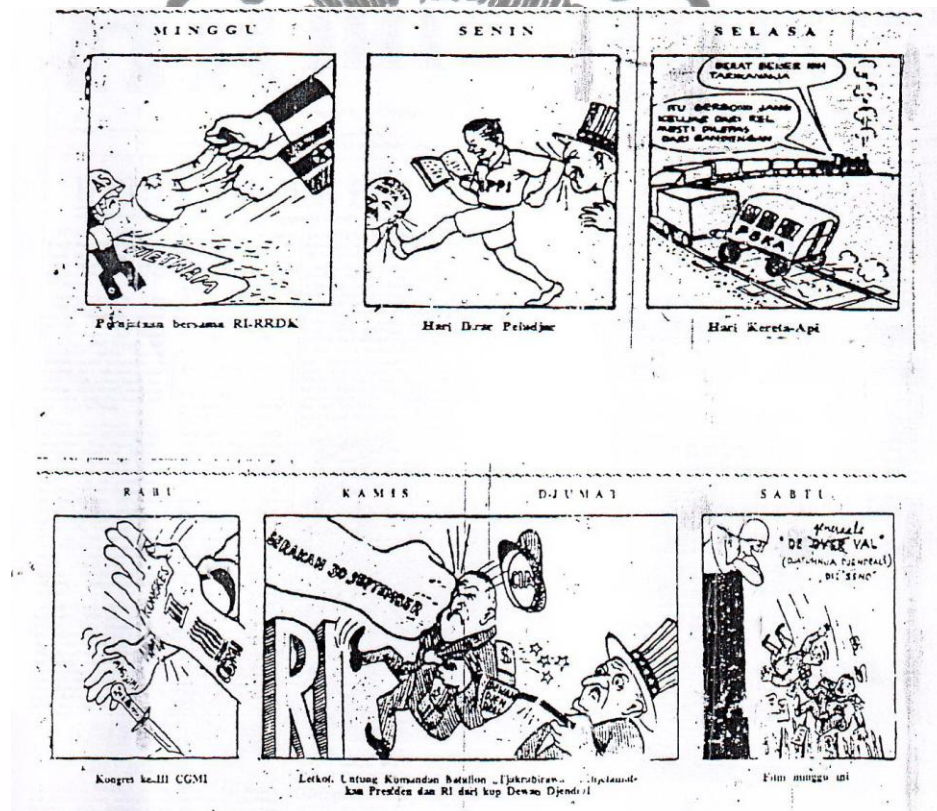
Selama tiga tahun sejak Kongres HMI ke-VII di Jakarta tahun 1963, kegiatan politik HMI bisa dikatakan terlalu besar. Bahkan dari sekian banyak kegiatan HMI, kegiatan politiknya yang sangat menonjol, meskipun dalam pengertian politik yang masih menjadi garis HMI. Salah satunya adalah mempertahankan diri dari pengganyangan CGMI/PKI. Upaya pengganyangan ini semestinya tidak layak dilawan oleh HMI. PKI adalah partai politik yang sangat militan, dengan jaringan organisasi yang rapi, mempunyai banyak organisasi pendukung, dan juga penguasaan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Soelastomo (10 Desember 2007)

media massa. Anggota PKI sudah mencapai jutaan orang. Belum lagi kekuatan pendukung PKI yang berbaju lain. Tentu tidak sebanding dengan HMI, sebuah organisasi mahasiswa yang independen, tidak mempunyai payung politik yang formal, tidak mempunyai media massa dan hanya terdiri dari anak-anak muda yang jumlah anggotanya hanya ribuan saja.<sup>4</sup> Dalam gambar karikatur di bawah terlihat bagaimana aksi ganyang HMI dilakukan dengan terbuka lewat media massa.

Gambar 1. Karikatur Harian Rakyat 2 Oktober 1965<sup>5</sup>



Sumber : Koleksi Mikro Film Perpustakaan Nasional Jakarta

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Karena karikatur inilah yang menyebabkan Harian rakyat dan khususnya PKI dianggap menjadi dalang utama G30S



Namun, dengan berbagai kegiatan yang begitu banyak di bidang politik itu, kegiatan HMI dibidang lain juga mengalami perkembangan. Dari segi keanggotaan, pertumbuhan jumlah anggota HMI sangat mengesankan. Di tahun 1957, jumlah anggota baru HMI di Jakarta hanya 150 orang. Pada tahun 1965, sekitar 2000 mahasiswa baru mendaftar sebagai anggota baru. Di Fakultas Kedokteran UI, apabila pada tahun 1957 hanya 2 orang yang masuk HMI, pada tahun 1965, sekitar 80 orang mahasiswa baru masuk HMI, yang berarti lebih dari lima puluh persen mahasiswa baru FKUI. HMI justru semakin populer dengan suasana pengganyangan pada saat itu.<sup>6</sup>

Di samping itu juga ada perkembangan HMI yang lain, yaitu pertumbuhan lembaga-lembaga kekaryaan, misalnya Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam dan lain-lainya. Khusus untuk Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam inilah yang akhirnya menjadi tulang punggung HMI di dalam syiar agama, oleh karena di LDMI-lah tempat pengemblengan mubaligh-mubaligh HMI. Dikemudian hari, aktivis LDMI inilah yang merintis pendirian Masjid Arief Rahman Hakim di Salemba 4.<sup>7</sup>

Kehadiran lembaga-lembaga ini adalah sangat penting untuk pengembangan kemampuan profesional di masyarakat. Disinilah segala ilmu yang diperoleh di bangku kuliah memperoleh momentum untuk diaplikasikan di masyarakat. Dengan perkataan lain, lembaga-lembaga kekaryaan merupakan forum peningkatan

---

<sup>6</sup> Sulastomo. 1989, *Hari-hari yang Panjang 1963-1966*. Jakarta: CV Haji Masagung, hal. 80.

<sup>7</sup> *Ibid* hal. 82.



kemampuan teknis anak-anak HMI. Selain itu, lembaga-lembaga itu juga berfungsi sebagai wadah untuk latihan kepemimpinan dan berorganisasi, mengingat jumlah kader HMI yang terus meningkat, yang tentunya tidak dapat ditampung di dalam kepengurusan HMI saja. Dengan kehadiran yang cepat dari lembaga-lembaga ini, sudah tentu harus lebih dikonsolidasikan di masa depan<sup>8</sup>. Di Kongres Surakarta inilah mulai dipikirkan untuk mengkonsolidasikan lembaga-lembaga ini.

Sejalan dengan perkembangan HMI, alumni HMI juga semakin berkembang. Sebelum peristiwa 30 September, banyak alumni HMI yang enggan menampakan diri. Pada saat itu memang HMI dalam keadaan yang berbahaya. Bisa jadi mereka takut tertimpa kesalahan HMI. Tetapi setelah peristiwa 30 September alasan itu menjadi hilang sama sekali. Karena itu, untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan alumni HMI, di dalam staf ketua PB HMI ditunjuk seorang staf Ketua Bidang Alumni yang dipegang oleh Saudara Ahmad Nurhani. Staf itu kemudian menyelenggarakan sebuah acara Musyawarah Alumni HMI di Bandung (1965) di mana Pangdam Siliwangi di waktu itu, yaitu Ibrahim Adjie menerima seluruh peserta musyawarah untuk mengadakan acara di Bandung. Kemudian dalam musyawarah tersebut disepakati untuk menampung para alumni HMI berupa sekedar pembinaan Korps. Karena itu disebut Korps Alumni HMI yang disingkat KAHMI. Pada waktu Kongres HMI VIII di Surakarta secara resmi Korps Alumni HMI diresmikan. Norman Razak adalah ketua pertama Korps Alumni HMI Jakarta (Kahmi Jaya).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal.75.

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 78

## 1. Persiapan Kongres

Memperhatikan keadaan seperti itu, Kongres HMI di Surakarta akan mempunyai arti yang sangat penting. Untuk itu, persiapan teknis dan materi harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dari segi perjalanan HMI, kongres ini juga mempunyai nilai historis. Saudara Nazar E Nasution bertindak sebagai Ketua Umum Panitia Nasional Kongres HMI III.<sup>10</sup>

Di dalam penyelenggaraan Kongres HMI, selalu menghubungi berbagai pihak, termasuk pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Pada saat itu telah terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Apalagi setelah diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang masih kontroversial. Dalam benak HMI dan mungkin juga sebagian rakyat Indonesia saat itu timbul pertanyaan pemerintah itu yang mana. Apalagi pemerintahan Sukarno sudah mulai kehilangan dukungan. Sementara Bung Karno dan kabinet (yang masih dipimpin Bung Karno) masih berfungsi. HMI bingung kepada siapa harus berhubungan. Satu-satunya lembaga yang dianggap tidak menimbulkan permasalahan adalah TNI Angkatan Darat. Karena itu PB HMI memutuskan untuk terlebih dahulu menghadap Menteri/Panglima Angkatan Darat, yaitu Jenderal Soeharto.<sup>11</sup>

PB HMI diterima oleh Letjen Basoeki Rahmat, yang pada waktu itu menjabat Asisten V Pangad. Tempatnya di Markas Besar Angkatan Darat di Jalan Veteran

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 76.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 77.

Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Soelastomo mengutarakan kedatangannya karena HMI merasa dekat dan mempunyai hubungan batin dengan TNI/Angkatan Darat, walaupun hubungan tersebut sifatnya tidak resmi. Secara implisit kalimat tersebut dimaksudkan untuk mengucapkan terima kasih atas “perlindungan” yang diberikan pada HMI, khususnya di dalam perjuangan menghadapi PKI. Kepada Letjen Basoeki Rahmat juga Soelastomo meminta bantuan untuk penyelenggaraan kongres dan memohon Jenderal Soeharto untuk dapat hadir dan memberikan sambutan. Sebagai catatan pada waktu itu istilah bantuan bukan saja berarti materi tetapi juga misalnya petunjuk-petunjuk. Di Kongres Surakarta memang Soeharto telah bersedia memberikan sambutan. Kongres itu sendiri telah berjalan lancar, sedikit banyak berkat bantuan pengamanan yang luar biasa dari aparat keamanan.<sup>12</sup>

## 2. Pencalonan Ketua Umum

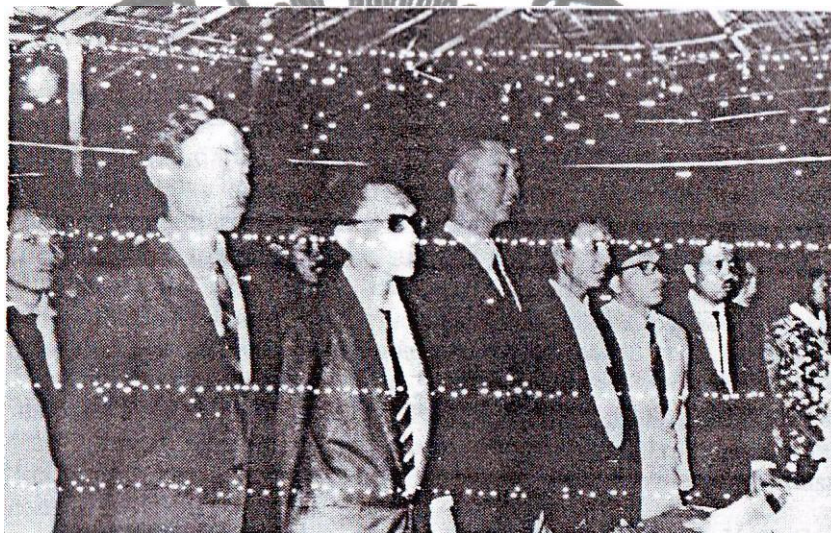
Selain hal tersebut di atas, yang perlu dipersiapkan juga adalah calon Ketua Umum PB HMI yang baru. Sebagai Ketua Umum PB HMI, Soelastomo secara moril berkewajiban mempersiapkan calon penggantinya. Ada tiga nama calon yang mengesankannya. Pertama adalah Nurcholis Madjid, yang pada waktu itu adalah Ketua Umum HMI cabang Ciputat. Soelastomo melihat potensi pribadinya yang kuat dari segi pemikiran intelektual. Kemampuan bahasanya juga bagus. Selain itu, dia anak IAIN, sehingga barangkali dapat memberi wajah yang lain. Kedua adalah Ahmad Dani G Martha, Ketua Badan Koordinasi HMI Jawa Barat. Soelastomo menilai dedikasi dan kecepatannya serta kebijaksanaan dalam menggerakkan roda organisasi yang ditempuh di Jawa Barat sangat mengesankan. Yang ketiga adalah

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 79.

Zulkifli, Ketua Umum HMI Banda Aceh. Soelastomo melihat sosok Zulkifli sebagai seorang penggerak organisasi, militan dan mempunyai dedikasi yang tinggi. Selain itu, dia juga seorang orator yang baik. Untuk memberi kesempatan yang sama, ketiganya ditarik ke PB HMI pada saat perubahan susunan PB HMI terakhir. Namun, pada saat Kongres HMI di Surakarta, Nurcholis Madjid terlihat menonjol dan melampaui yang lainnya.<sup>13</sup>

**Gambar 2. Kongres HMI di Surakarta<sup>14</sup>**



Sumber : Koleksi Pribadi Soelastomo

Di Kongres Surakarta ini juga memperhatikan beberapa hal lainnya. Pertama adalah perkembangan lembaga-lembaga kekartayaan. Karena itu, Kongres Surakarta juga dijadikan musyawarah lembaga-lembaga HMI. Kedua adalah masalah alumni HMI. Di Kongres Surakarta juga dijadikan musyawarah pertama alumni HMI, dan diresmikannya Korps Alumni HMI (KAHMI). Ketiga adalah HMI-wati yang

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Soelastomo (10 Desember 2007)

<sup>14</sup> Kongres HMI Surakarta. Di baris depan Saudara Nurcholis Madjid, Nazar E. Nasution, Irfai, Mas Lafran Pane, dan Saudara Ahmad Nurhani.



semakin besar. Kongres Surakarta juga merupakan kelahiran Korps HMI-wati (KOHATI).

### 3. Pelaksanaan Kongres

Kongres Surakarta merupakan Kongres HMI yang terbesar. Peserta kongres mencapai tiga ribu orang. Dan yang unik, anggota RPKAD juga ikut membantu pengamanan. Selain Soeharto, juga ikut memberi sambutan adalah Jenderal Nasution dan sejumlah menteri. Gubernur Jateng Munadi dan Pangdam Diponegoro Surono hadir memberikan sambutan pada pembukaan kongres yang diselenggarakan di pendapa Balai Kota Surakarta. Sidang-sidang kongres berlangsung di Universitas Tjokroaminoto sedangkan tempat menginap para delegasi adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah dan keluarga-keluarga muslim di Surakarta.<sup>15</sup>

Beberapa hal yang menjadi penting dalam kongres ini adalah bagaimana memaknai sambutan yang diberikan oleh Soeharto yang saat itu menjadi pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang saat ini juga masih diliputi kontroversi.

Dalam sambutannya Soeharto menyatakan bahwa betapa pentingnya Kongres HMI Surakarta ini karena diharapkan dari kongres ini yaitu sumbangan dan darma baktinya terhadap penjabolan Orde Lama dan terwujudnya Orde Baru sebagai realisasi dari ketetapan-ketetapan Sidang Umum IV MPRS. Bukan itu saja, kongres HMI ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangannya yang positif dan konstruktif terhadap tercapainya tugas Kabinet Ampera menciptakan stabilisasi ekonomi serta program catur karya yang telah diperintahkan oleh MPRS dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal. 80

menghancurkan sisa-sisa kontrev G30S/PKI yang sedang meningkatkan aksi-aksi gerilya politiknya.<sup>16</sup>

Hendaknya semua warga HMI menyadari sedalam-dalamnya bahwa kongres sekarang ini mempunyai arti penting, baik dari segi perjuangan HMI khususnya maupun bagi perjuangan bangsa Indonesia umumnya. Pentingnya kongres ini terletak pada pertama, diharapkan sumbangan dan darma baktinya terhadap penjabolan Orde Lama dan terwujudnya Orde Baru yang sedang mulai kita bangun, sebagai realisasi dari ketetapan-ketetapan Sidang Umum IV MPRS. Kedua, kongres ini diharapkan dapat memberikan sumbangannya yang positif dan konstruktif terhadap tercapainya tugas Kabinet Ampera menciptakan stabilisasi ekonomi serta program catur karya yang telah diperintahkan oleh MPRS. Ketiga, menghancurkan terhadap sisa-sisa kontrev G30S/PKI yang sedang kita rasakan mereka sedang meningkatkan aksi-aksi gerilya politiknya, sedang meningkatkan kewaspadaan terhadap unsur-unsur subversive dan infiltrasi lainnya yang hendak menghancurkan Pancasila kita ini.

Dalam pidato Soeharto pada Kongres HMI ke-VIII di Surakarta tanggal 10 September 1966 dapat ditarik benang merah bahwa Soeharto juga mencari dukungan dari segenap warga HMI demi mensukseskan jalannya menuju kursi pemerintahan yang memang sudah berada di depan mata. Soeharto juga menekankan bahwa di bawah Orde Lama telah terjadi penyelewengan, pengkhianatan dan fitnah-fitnah yang dilakukan selama prolog dan epilognya G30S disegala tata kehidupan politik, ekonomi, sosial kultur dan militer.<sup>17</sup>

Dalam laporan Pengurus Besar HMI pada Kongres HMI ke-VIII di Surakarta juga mengkhususkan laporan menyangkut masalah-masalah politik sedangkan masalah-masalah lain dilaporkan dalam laporan kerja PB HMI. Didalam laporan tersebut tersirat bahwa setelah Kongres HMI ke-VII atau kongres yang lalu kondisi

---

<sup>16</sup> Amanat Jenderal Soeharto Ketua Presidium Men Utama Hankam Menteri Panglima Angkatan Darat pada Kongres HMI ke-VIII Surakarta tanggal 9 September 1966.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 2.



politik ekstern HMI dapat dikatakan baik. Hal ini didasarkan kepada *approach/goodwill* yang diberikan oleh pimpinan Negara/pemerintah pada saat itu kepada Kongres HMI ke-VII. Namun dengan adanya hasil positif tersebut juga memberikan suatu kemungkinan bahwa beberapa kalangan kekuatan politik menempatkan HMI pada sorotan mereka.<sup>18</sup>

Dalam laporannya<sup>19</sup> juga Pengurus Besar HMI membagi kekuatan yang mendominasi politik Indonesia menjadi 4, yaitu pertama Bung Karno yang dianggap figure yang paling menentukan. Kepemimpinannya praktis mutlak dalam mengambil inisiatif serta isu-isu politik. Kedua, Angkatan Darat / ABRI yang dianggap sebagai kekuatan politik tetapi belum menemukan *formnya*. Kemungkinan disebabkan landasan konsepsional yang belum ada. Ketiga, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang secara kuantitatif maupun kualitatif dianggap telah siap. Keempat, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Nahdatul Ulama (NU) yang dianggap secara kuantitatif sudah cukup, akan tetapi secara kualitatif belum bisa mengimbangi PKI. Dalam laporannya juga PB HMI menganggap bahwa usaha pembubaran HMI oleh PKI merupakan strategi demi menciptakan konflik disamping maksud untuk menghancurkan HMI itu sendiri sebagai lawan politiknya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Laporan Pengurus Besar HMI pada Kongres VIII di Sala 10 -17 September 1966.*

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 1

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 4

**Gambar 3. Soelastomo Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban  
PB HMI**



Sumber : Koleksi Pribadi Soelastomo

#### **4. Pendirian KAHMI**

Misi kehadiran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang lahir di tengah-tengah revolusi tanggal 5 Februari 1947, tercermin dalam tujuan pendirian HMI itu sendiri, yaitu: mempertahankan Negara Republik Indonesia, mengembangkan syiar dan dakwah Islam, dan menciptakan insan akademis. Tujuan pendirian HMI ini

kemudian dikenal sebagai ciri khas HMI, yaitu orientasi pada keislaman, kebangsaan dan keintelektualan.<sup>21</sup>

Tak dapat dipungkiri, dengan landasan inilah HMI telah banyak berperan dan memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia. Secara periodik, HMI telah melewati beberapa fase dan akan menghadapi fase-fase berikutnya dalam perjalanan sejarahnya. Beberapa fase penting yang telah dilewati, di antaranya adalah fase perjuangan fisik. Ini ditandai dengan terlibatnya para kader HMI dalam Angkatan Perang RI dalam menghadapi agresi Belanda, perlawanan terhadap PKI tahun 1948 dan G.30.S tahun 1965. Kemudian fase konsolidasi organisasi yang ditandai dengan tumbuhnya cabang-cabang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Fase selanjutnya adalah fase menyatunya HMI dengan barisan Orde Baru. Bahkan lahirnya Korps Alumni HMI KAHMI pada 17 September 1966, di samping bertujuan meneruskan cita-cita HMI, adalah juga untuk memperkuat barisan Orde Baru.<sup>22</sup> Melalui seluruh fase-fase inilah para aktivis HMI kini berhasil menempati berbagai posisi penting, baik di jalur birokrasi pemerintahan maupun di sektor-sektor sosial kemasyarakatan lainnya.

## 5. HMI dan KAHMI

Hubungan antara KAHMI dan HMI antara lain bahwa alumnus HMI sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia masa kini terus berjuang dan mengisi

---

<sup>21</sup> Muhammad Dayyan, "Merajut Silaturahmi Kecendikiaan", dalam *Serambi Indonesia*, 18 April 2009.

<sup>22</sup> HMI, KAHMI dan Tantangannya, *Harian Republika*, 18 Februari 1997.



kemerdekaan Negara Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Lebih jelas lagi disebutkan pula bahwa menginsyafi akan adanya persamaan latar belakang motivasi sejarah perjuangan, identitas dan aspirasi sebagai kelanjutan tujuan HMI, maka para alumni HMI membentuk organisasi KAHMI.

KAHMI berazaskan Pancasila. Sedangkan sifat, fungsi dan tujuan KAHMI adalah organisasi cendekiawan bersifat kekeluargaan dan independen, KAHMI berfungsi sebagai wadah himpunan warga alumni HMI guna mengembangkan ilmu, kepribadian dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta forum komunikasi bagi warga. Selain itu terbinanya warga sebagai cendekiawan penalar dengan iman dan Islam yang teguh dan semangat kebangsaan yang kukuh, mengambil bagian dalam usaha mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan diridhoi oleh Allah SWT.<sup>23</sup>

Kehadiran KAHMI yang lahir pada 17 September 1966, bersamaan dengan lahirnya Orde Baru, tidak bisa dipisahkan dari kehadiran HMI yang lahir pada 5 Februari 1947, di tengah kancah revolusi. Pada mulanya KAHMI terbentuk di daerah-daerah sebagai organisasi paguyuban. Kemudian dari munas ke munas paguyuban-paguyuban ini terus berkembang dan akhirnya menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang

---

<sup>23</sup> <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/20/0212.html>

Keormasan.<sup>24</sup> Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yakni, bahwa alumni HMI kini berada dan berprestasi pada setiap segi kehidupan. Sebagian berada pada jalur pemerintahan, sebagian lagi aktif dalam organisasi kekuatan politik, pendidikan, pengusaha, ABRI, seniman dan dalam segi kehidupan lainnya.

Disepakati pula tentang peranan KAHMI dalam mendukung tercapainya cita-cita HMI. Oleh karena itu keberhasilan KAHMI dapat pula diukur dari tercapainya misi HMI. Selain itu KAHMI adalah merupakan aset bangsa dan negara yang mengembangkan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang tetap konsisten dengan cita-cita perjuangan HMI, dan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh sebab itu perlu terus menerus dilakukan konsolidasi organisasi, dan senantiasa mengadakan kerjasama dengan pemerintah, ABRI, ormas Islam dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi secara partisipatif terhadap pembangunan nasional.

---

<sup>24</sup> Dalam Arus Politik Memecah KAHMI, *Harian Umum Pelita*, 7 Nopember 2008.  
*commit to user*

## **BAB IV**

### **KONGRES HMI VIII TAHUN 1966 DAN KONDISI POLITIK**

#### **PADA MASA TRANSISI**

Peralihan kepemimpinan nasional sudah beberapa kali dialami dalam sejarah Indonesia. Salah satu yang menarik dalam proses peralihan kepemimpinan Indonesia yaitu yang pertama kali, peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Proses itu terjadi pada dasawarsa 1960-an dan secara tuntas berakhir pada tahun 1967, ketika MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat Presiden. Kongres HMI VIII di Surakarta telah ikut pula dalam proses peralihan kepemimpinan nasional tersebut. Meskipun mungkin masih bisa dibilang kecil pengaruhnya, namun hal ini bisa memperbanyak khasanah sejarah bangsa kita.

#### **A. Dualisme Kepemimpinan Nasional**

Pada masa itu, menjelang kongres HMI VIII berlangsung, Presiden Soekarno telah mendapat mandat sebagai Presiden Seumur Hidup dari MPRS. Beliau juga memperoleh predikat Pemimpin Besar Revolusi dan sebagai Presiden juga menjadi Panglima Tertinggi ABRI. Baik secara konstitusional maupun realita politik, kekuasaan Presiden Soekarno sangat besar. Beberapa organisasi kemasyarakatan bahkan sempat memberikan predikat tambahan dengan menggunakan istilah “Agung”.



Meskipun demikian, pergulatan politik tidak berhenti. Agaknya semua kekuatan politik masih bermain sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan politiknya. Mereka masih sangat memperhitungkan fakta Soekarno sebagai penentu perjalanan bangsa. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah salah satu kekuatan politik yang pandai memanfaatkan keadaan saat itu. Dengan maneuver-manuver politiknya, PKI berhasil menguasai dan mengarahkan situasi sejalan dengan tujuan politiknya.

Secara nasional, konsep Nasionalisme-Agama-Komunis (Nasakom) menjadi platform resmi yang menetapkan struktur politik. Representasi politik harus selalu memperhatikan unsur Nasakom, termasuk pada pimpinan Front Nasional dan pimpinan lembaga legislatif. Di luar lembaga eksekutif (kabinet), praktis konsep Nasakom telah berjalan. Sedangkan di lembaga eksekutif, meskipun telah ada beberapa menteri dari PKI, namun porsi-porsi penting belum berhasil direbut PKI. Namun dengan platform resmi Nasakom itu, PKI memperoleh peluang berkembang di seluruh Indonesia, sungguh pun di berbagai daerah, misalnya di Aceh, potensi kaum Komunis sangat kecil.

Sesungguhnya secara konseptual maupun politis, PKI juga menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan maneuver-manuvernya. Di kalangan militer, khususnya di kalangan Angkatan Darat (AD), konsep Nasakom lebih sering disuarakan sebagai Nasionalis-Agama-Sosialis (Nasasos). Secara sadar kaum militer sendiri, sejak akhir dasawarsa tahun 50-an, juga telah melakukan upaya mengimbangi kaum komunis. Dibentuklah berbagai Badan Kerja Sama (BKS) antara kaum militer dan organisasi non politik, seperti misalnya BKS Pemuda-Militer, BKS Buruh-

Militer dan lain-lainnya. Pembentukan BKS-BKS itu sedikit banyak merupakan manifestasi kekhawatiran kaum militer pada kecenderungan politik yang terjadi.<sup>1</sup>

Para tokoh militer secara langsung juga telah menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai peranan kaum komunis pada Soekarno. Waktu menjadi Panglima Kodam Diponegoro, misalnya pernah menyampaikan kekhawatiran itu pada Soekarno. Demikian juga gagasan pembentukan Angkatan Kelima- sebuah Angkatan (militer) yang terdiri dari para sukarelawan/organisasi kemasyarakatan- sampai saatnya PKI dibubarkan, gagal dilaksanakan. Demikian juga tuntutan PKI terhadap pembubaran HMI, ternyata juga tidak berhasil. Pada tanggal 29 September 1965, satu hari sebelum G30S, di forum Kongres CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia organisasi mahasiswa di bawah PKI), Ketua CC PKI DN Aidit mendesak Soekarno untuk membubarkan HMI. Tetapi, baik Wakil Perdana Menteri Leimena maupun Soekarno bergeming menghadapi tuntutan DN Aidit dan CGMI. Soekarno, bahkan mengatakan, bahwa CGMI pun akan dibubarkan, seandainya CGMI juga kontrarevolusi.

Suasana politik seperti itu, sesungguhnya menunjukkan bahwa PKI belum sepenuhnya menguasai isu politik. Dan sebaliknya, Soekarno-lah yang masih memegang kendali politik dan bahkan satu-satunya. Tentu, Soekarno juga memainkan “kartu-kartu”, bagaimana semua kekuatan politik yang ada dapat dimanfaatkan bagi kepentingan politik dan kepemimpinannya, sungguh pun oleh banyak kalangan dianggap sebagai permainan politik yang berbahaya. Dan ternyata,

---

<sup>1</sup> Sulastomo, *Pemikiran Tentang Kehidupan Berbangsa*, 1987, Jakarta: CV. Haji Masagung, hal. 107.

ketika G30S meletus, kekhawatiran itu mulai bersemi menjadi suatu kenyataan yang memang benar adanya.

Adanya “dualisme” kepemimpinan nasional, ternyata menjadi cikal bakal transisi kepemimpinan nasional. Dan, dualism itu terjadi semenjak meletusnya G30S. Opini nasional terbelah menjadi dua kutub, antara pembubaran PKI, dengan kutub yang belum bersedia membubarkan PKI. Mayoritas rakyat, ternyata berada di belakang tuntutan pembubaran PKI, sementara Soekarno berada pada posisi untuk memenuhi tuntutan rakyat atau tidak. Soeharto, selaku tokoh senior AD, di mana tujuh putra terbaik AD menjadi korban G30S, dapat dipastikan berdiri pada tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI. Sementara itu strategi pasca G30S Orde Baru adalah kembali pada UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Polarisasi opini politik di tingkat nasional itu, pada akhirnya mengarah pada tokoh yang berdiri pada opini yang bersangkutan. Secara cepat, Soekarno menjadi sasaran tuntutan pembubaran PKI dan karena Soekarno tetap bertahan pada sikapnya sendiri, yang tetap mempertahankan eksistensi PKI, maka (pada akhirnya) hampir seluruh kebijakan Soekarno menjadi sasaran kritik. Misalnya sindiran Kabinet 100 Menteri, predikat Durno bagi Waperdam Soebandrio, dan juga pembantu-pembantu Presiden lainnya. Meskipun masih menggunakan sasaran antara, demonstrasi-demonstrasi mahasiswa sesungguhnya sudah mulai mengarah sasaran pada Soekarno sendiri.

## B. Hubungan Soekarno dan HMI

Sikap Soekarno sesungguhnya sudah jelas. Selain instruksi Presiden No. 08 tahun 1964, di dalam suratnya No. 295/K/1964 tertanggal 22 Juni 1964 Presiden Soekarno telah merestui usaha latihan dakwah yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) di Bandung. Demikian juga 15 hari sebelum G30S, selaku Panglima Besar Kotrar, Presiden Soekarno telah mengeluarkan Surat Keputusan Kotrar (Komando Tertinggi Retuling Aparatur Revolusi) No: Tr/1953/Kotrar/65 tertanggal 15 September 1965, di mana HMI tidak dibubarkan, dinyatakan jalan terus dan mempunyai hak serta kedudukan yang sama dengan organisasi mahasiswa lainnya. Tetapi, pengganyangan terhadap HMI justru semakin meningkat. Dalam gambar di bawah tampak Demontrasi Generasi Muda Islam (Gemuis) di depan Kotrar pada tanggal 13 September 1965. Sebuah spanduknya berbunyi : “Langkahi mayatku sebelum ganyang HMI. Di belakang petugas keamanan adalah Sofia Yusuf Syakir, seorang HMI-wati.<sup>2</sup>

**Gambar 4. Demontrasi Generasi Muda Islam (Gemuis)**



Sumber : Koleksi Pribadi Soelastomo

<sup>2</sup> Sulastomo. 1989, *Hari-hari yang Panjang 1963-1966*. Jakarta: CV Haji Masagung, hal. 18.  
*commit to user*



Tidak saja pengganggauan terhadap HMI yang semakin meningkat, tetapi “ofensif revolusioner” yang dilancarkan PKI memang semakin luas. Suasana politik, tidak saja ramai oleh pengganggauan terhadap HMI, tetapi juga terhadap BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme) dan juga pada Manikebu. Di berbagai daerah bentrokan fisik sudah terjadi. Dan yang terjadi sesungguhnya adalah semakin terjadinya polarisasi antara kekuatan komunis dan antikomunis.

Dapat dipahami, apabila keadaan semakin panas. Generasi muda Islam/Gemuis misalnya, pada tanggal 13 September 1965 mengadakan demonstrasi di depan Kotrar, Merdeka Barat dalam rangka solidaritas terhadap HMI. Salah satu spanduk yang terpasang berbunyi “LANGKAHI MAYATKU SEBELUM GANYANG HMI”<sup>3</sup>

Dalam suasana yang semakin panas itu, unjuk kekuatan antar kekuatan politik sudah benar-benar terlihat. Di jajaran partai politik antara PKI, NU dan PNI sudah saling menunjukkan kekuatan fisiknya. Hal ini tercermin dari acara-acara yang mereka selenggarakan, yang selalu disertai keluarnya barisan pemuda dengan drumbandnya yang sudah siap menghadapi sesuatu yang mungkin terjadi.

Namun, sebuah antiklimaks terjadi pada tanggal 29 September 1965. Tempatnya, di Gedung Gelora Senayan (sekarang Gelora Soekarno) Jakarta. Peristiwanya adalah ketika Aidit sendiri menuntut pembubaran HMI. Kata Aidit, lebih baik pakai sarung kalau tidak bisa membubarkan HMI. Tetapi baik Pak Leimena maupun Soekarno, tampaknya tidak bisa digertak di dalam forum yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 23.

seganas itu. Soekarno bahkan dengan lantang berkata, CGMI pun, apabila ternyata kontra revolusioer, juga akan dibubarkan.<sup>4</sup>

Suasana politik di sekitar awal 1960-an, antara lain juga diwarnai oleh peranan Soekarno yang semakin menonjol. Sebenarnya, juga merupakan konsekuensi yang logis dari berlakunya UUD 1945, sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tetapi, proses yang mendahului sebelumnya juga memberi warna pada suasana politik awal 1960.



**Gambar 5. HMI di Istana Bogor**

Sumber : Koleksi Pribadi Soelastomo

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terlepas bagaimana orang menilai kehadiran dekrit itu, merupakan puncak dari penyelesaian gagalnya Konstituante hasil pemilu 1955 menyusun undang-undang dasar negara yang baru. Yang menjadi masalah utama adalah perdebatan di sekitar dasar Negara, Islam atau Pancasila.<sup>5</sup> Kenyataan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 39



ini senang atau tidak senang, menimbulkan gambaran polarisasi politik tertentu di dalam masyarakat kita.

Bayang-bayang gagalnya Konstituante menyusun UUD sebenarnya sudah dapat dilihat sebelum Konstituante itu sendiri terbentuk. Itu bisa dicermati pada saat-saat sebelum Pemilu. Khususnya pada saat janji-janji parpol dilontarkan. Dalam tulisannya Jenderal A.H Nasution menyatakan bahwa dikalangan teman-teman perwira cukup banyak terasa di waktu itu kesangsian kalau-kalau Kontituante nanti mengubah Negara Proklamasi. Maka dari itu dibentuklah kumpulan pemilih IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang akan ikut Pemilu, terutama untuk Konstituante guna memperjuangkan kembali ke UUD 1945, sebagai jalan keluar dari frustrasi masa itu. Gerakan kembali ke UUD 1945 ini baru berusia 1 tahun lebih waktu Pemilu, sehingga hasilnya hanya sedikit. Di antaranya yang terpilih adalah Koloner Gatot Subroto dan Jenderal AH Nasution sendiri.<sup>6</sup>

AH NASution kemudian mengundurkan diri dari Konstituante, berhubung pengangkatannya selaku KSAD. Meskipun demikian, gagasan kembali ke UUD 1945 terus diperjuangkan sampai pada akhirnya lahir sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selain itu di dalam proses kembalinya ke UUD 1945 juga ada upaya kompromi, khususnya dengan golongan Islam. KH Saifudin Zuhri, yang pada waktu itu adalah Sekjen NU menulis antar lain ;

Suatu malam di awal Juli 1959, telepon di rumah berdering pada pukul 01.30 dinihari. Pak Idham Chalid, Ketua Umum PBNU meminta saya datang ke rumahnya di Jalan Yogya. Saya diminta mendampingi beliau berhubung

---

<sup>6</sup> A.H Nasution, 1984, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4*, Jakarta: CV Haji Masagung, hal. 201.

akan datang dua orang pejabat amat penting. Pukul 02.00 lebih sedikit saya tiba di Jalan Yogya 51 dan tak berapa lama dua orang tamu sangat penting itu, yang tak lain adalah Jenderal A.H Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat/Menteri Keamanan Pertahanan. Adapun yang lain adalah Letkol CPM R. Rusli, Komandan CPM seluruh Indonesia.

Kedatangan kedua perwira tinggi itu untuk meminta saran NU berhubung kedua-duanya akan berangkat ke Tokyo untuk menghadap Presiden Soekarno yang berobat ke sana. Dari kalangan Angkatan Perang Republik Indonesia/APRI akan mengusulkan kepada Presiden agar UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden.<sup>7</sup>

Demikianlah, meskipun UUD 1945 akhirnya berlaku kembali melalui Dekrit Presiden, upaya itu juga mendapat persetujuan golongan Islam. Bahkan dengan diperolehnya persetujuan DPR, maka seluruh partai Islam ikut menyetujui berlakunya UUD 1945 itu. Tetapi, tidak hanya masalah itu yang ikut memberi warna suasana politik waktu itu. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi, dengan alasan partai tidak bersedia menyalahkan tokoh-tokohnya yang terlibat di dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Setelah itu, juga GPII ikut dibubarkan, karena GPII dianggap anak Masyumi.<sup>8</sup>

Semua rentetan peristiwa itu, ditambah peristiwa-peristiwa lainnya, telah menumbuhkan suatu gambaran tertentu bagi sebagian umat Islam di masyarakat, khususnya di dalam kehidupan politik. Untuk sebagian, gambaran ini bisa saja sengaja diciptakan oleh kelompok kepentingan tertentu.

Dengan pembubaran Masyumi dan GPII, menjadikan kedua organisasi itu memang organisasi “terlarang”. Namun, permainan politik di waktu itu telah memperluas sasaran untuk menjadikan organisasi “terlarang” juga pada organisasi

---

<sup>7</sup> K.H Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, Jakarta: PT Gunung Agung, hal. 45

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 40.

Islam yang dianggapnya “dekat” dengan Masyumi/GPII. HMI oleh kalangan politisi ini dimasukkan sebagai sasaran itu, oleh karena HMI juga dianggap sebagai anak Masyumi. Sengitnya perdebatan tentang Islam dan Pancasila, juga digunakan sebagai peluang untuk memperluas predikat itu menjadi anti-Pancasila. Sedangkan dari kacamata revolusi, sudah tentu predikat yang tepat adalah kontrarevolusi. Gambaran organisasi terlarang, anti-Pancasila dan kontrarevolusi sudah merupakan gambaran yang baku yang diperuntukkan bagi suatu kelompok umat Islam. Gambaran ini untuk sebagian juga menyeret HMI.

Suasana defensif yang menyelimuti HMI saat itu, berhadapan dengan suasana ofensif kehidupan politik, agar tidak ketinggalan dengan jalannya revolusi. Soelastomo, sebagai Ketua Umum HMI mamahami betul kondisi itu. Sikap HMI terhadap Soekarno sudah tentu memperhatikan situasi defensif yang melingkupi HMI. Dalam pandangan Soelastomo, sosok Soekarno adalah seorang pemimpin besar yang revolusioner. Sebagai seorang yang revolusioner, dia sangat mengandrungi kehidupan yang dinamik, yang serba besar. Bangsa Indonesia, kata Soekarno, bukan bangsa tempe, tetapi adalah bangsa yang besar. Karena dia seorang revolusioner, maka ia senang pada gerakan-gerakan yang militant, tidak loyo. Dan HMI harus dapat merebut kesan itu bila tidak mau dibubarkan.<sup>9</sup>

HMI harus ikut jalannya revolusi dan tidak boleh ketinggalan. Karena dengan jalan itu juga HMI dapat lebih banyak memberikan sumbangan pada perjuangan secara keseluruhan dan ikut bertanggung jawab terhadap jalannya revolusi, baik

---

<sup>9</sup> *Wawancara dengan Sulastomo (10 Desember 2007)*  
*commit to user*

ataupun buruknya.<sup>10</sup> Untuk menumbuhkan kesan itu HMI melakukan beberapa percobaan seperti yang dilakukan PKI, misalnya menyampaikan suatu resolusi dengan dukungan massa (demonstrasi). Percobaan ini sudah tentu akan memberikan dampak ganda. Pertama menghapus *image* seolah-olah hanya PKI sendirilah yang dapat berdemonstrasi dan kedua memberikan dampak politis yang lebih besar terhadap sesuatu yang hendak diperjuangkan.

Kemudian dipilihlah tema demonstrasi yang tepat, yang sesuai dengan hidupnya HMI. Maka, tema yang dipilih pertama adalah Prof. Prijono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu yang mengesankan ikut merestui tuntutan pembubaran HMI. Tema demonstrasi adalah Rital Prof. Prijono, sehingga sekaligus HMI sebenarnya sudah mengambil sikap ofensif. Dan karena demonstrasi itu adalah demonstrasi yang pertama dilakukan oleh HMI, maka persiapan demonstrasi juga dilakukan sangat berhati-hati.<sup>11</sup>

Kronologis demonstrasi berawal di Masjid Agung Al-Azhar di awal tahun 1964 waktu sekitar pukul 03.00 pagi, kelompok inti kaum demonstran berkumpul, merencanakan waktu, peta demonstrasi serta yel-yel yang akan dikumandangkan. Komandan demonstrasi adalah Ekkie Syachruddin. Dimulai dengan sembahyang tahajud, dengan imam Bapak Dalari Umar yang juga bertingkat sebagai pembangkit moral anak-anak HMI. Selesai sembahyang subuh, pasukan inti bergerak dan menduduki posisi-posisi yang telah ditetapkan di sekitar Jalan Cilacap (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), sementara anggota HMI lainnya berangsur-angsur

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Op cit*, hal.42.

menuju Jalan Cilacap dengan upaya sendiri. Tanpa diduga, bahwa banyak anak HMI yang ternyata dengan bersemangat mengikuti demonstrasi. Maka terciptalah suatu pola kegiatan baru HMI, yaitu demonstrasi.<sup>12</sup>

Keseluruhan sikap dan langkah HMI, tampaknya memang telah berhasil meyakinkan Soekarno. Hal ini dapat terlihat sewaktu Soekarno dan Leimena<sup>13</sup> dengan tegar menolak tuntutan pembubaran HMI oleh Aidit dan CGMI di forum terbuka di Istora Senayan tanggal 29 September 1965, hanya satu hari sebelum G30S.

Sementara itu, pasca G30S, demonstrasi untuk menuntut pembubaran PKI semakin menghebat. Soekarno mengesankan enggan untuk memenuhi tuntutan itu. Sampai akhirnya keadaan telah mendesak PB HMI untuk menentukan sikap dengan tegas. Sebab, peranan anak-anak HMI di dalam demonstrasi mahasiswa adalah sangat besar, kalau tidak dikatakan sebagai yang terbesar. Orang, dengan demikina sangat mudah membaca sikap HMI dari demonstrasi mahasiswa, meskipun dengan demonstrasi itu sendiri tidak mengatasnamakan HMI. Maka diselenggarakanlah pertemuan di Pasar Minggu pada bulan desember 1965 dan di hadiri lengkap oleh anggota pleno PB HMI.<sup>14</sup>

Dalam pertemuan tersebut banyak usul untuk menjadikan Soekarno sebagai sasaran demonstrasi. Sudah tentu ada di antara usul itu yang dengan perhitungan dan ada juga usul yang dilatarbelakangi sekadar semangat saja. Yang dengan perhitungan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 43

<sup>13</sup> Johannes Leimena adalah Wakil Perdana Menteri II saat itu dan sering menjadi pejabat presiden bila Soekarno pergi ke luar negeri (<http://community.kompas.com/read/artikel/2102>)

<sup>14</sup> *Op cit*, hal.44



mengatakan, bahwa tidak hanya kalangan HMI yang sudah siap untuk sasaran ke Soekarno, tetapi juga kalangan lainnya.<sup>15</sup>

**Gambar 6. Di Istana Merdeka, 23 Februari 1966<sup>16</sup>**



Sumber : Koleksi Pribadi Soelastomo

Secara tegas Soelastomo menyatakan bahwa HMI tidak bermaksud mendongkel Soekarno. Dan itu adalah hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum HMI. Meskipun berjalan panas akhirnya pertemuan itu menerima kebijakan Soelastomo.

Sikap HMI terhadap Soekarno yang paling terlihat jelas adalah ketika Kongres HMI VIII di Surakarta berlangsung. HMI tidak mengundang Soekarno melainkan Soeharto untuk memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres. Di situ adalah salah satu isyarat keberpihakan HMI. Padahal saat itu Soekarno masih sebagai Presiden RI yang sah.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 45

<sup>16</sup> Di Istana Merdeka, 23 Februari 1966. Dari kiri ke kanan : Firdaus Wadjdi, Nurcholis Madjid, Syam Alamsyah, Soelastomo, Bung Karno, Mas Dahlan, Nabhani Misbach, Ahmad Nurhani. Di barisan belakang tampak Mar'ie Muhammad dan Ekkie Syachrudin. (Dalam wawancara Soelastomo)



### C. Hubungan Soeharto dan HMI

Kenyataan adanya dualisme kepemimpinan memang tidak bisa dielakkan setelah meletusnya G30S. Namun ini bukanlah berarti ada dua pemimpin atau dua pemerintahan, tetapi sekadar ingin menggambarkan bahwa pada tingkat kepemimpinan nasional tidak ada kesamaan pendapat didalam menghadapi satu masalah besar, yaitu penyelesaian G30S. Dan perbedaan ini kemudian juga melebar pada masalah-masalah lainnya, misalnya masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Dualisme ini terjadi ketika adanya polarisasi antara sikap yang ingin memenuhi tuntutan pembubaran PKI dan sebaliknya.

Panglima Kostrad, Mayjen TNI Soeharto, telah mencanangkan tema melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam menghadapi penyelesaian masalah yang pelik itu. Tema ini disampaikan pada saat menerima beberapa aktivis gerakan anti G30S pada tanggal 6 Oktober 1965 malam.<sup>17</sup>

Dengan tema sentral seperti itu, maka secara implisit memberi makna bahwa sesungguhnya telah terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Rapat di Merdeka Barat, di gedung Koti (Komando Operasi Tertinggi) yang dihadiri oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang berlangsung pada tanggal 2 Oktober 1965 untuk menggalang kekuatan melawan G30S merupakan pertanda pertama dari adanya dualisme itu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Op cit*, hal. 48

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 49

Pada pertengahan tahun 1966, setelah pembubaran PKI dan pembubaran Kabinet 100 Menteri, mandat presiden seumur hidup bagi Soekarno pun juga dicabut dengan disertai permintaan maaf (TAP No. XVIII/MPRS/1966)

Keputusan mengenai pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya juga dicetuskan dalam sidang MPRS bulan Juni-Juli 1966 (TAP No. XXV/MPRS/1966). Kemudian juga adanya keputusan untuk meneliti ajaran Soekarno (TAP No. XXVI/MPRS/1966) dan keputusan untuk membentuk Kabinet Ampera (TAP No. XIII/MPRS/1966). Di dalam keputusan membentuk Kabinet Ampera, MPRS menugasi pengemban SP 11 Maret (yang telah dikukuhkan dengan TAP No. IX/MPRS/1966) untuk membentuk kabinet bersama-sama dengan Presiden.<sup>19</sup>

Tanpa diduga, PB HMI memperoleh undangan untuk Hearing Kabinet, bertempat di Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran. Maka, diselenggarakanlah rapat PB HMI lengkap yang membicarakan materi yang akan disampaikan pada pengemban SP 11 Maret dan juga masalah personalia kabinet. Akhirnya disepakati untuk membuat rumusan usul bahwa yang penting adalah untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional dan bagaimana bentuknya diserahkan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 53

kepada formatur kabinet, dalam hal ini adalah Soeharto sendiri. Itulah yang akhirnya disampaikan pada Hearing Kabinet di Markas Besar Angkatan Darat.<sup>20</sup>

**Gambar 7. Headline Harian Umum Berita Yudha yang memberitakan tentang hearing kabinet**



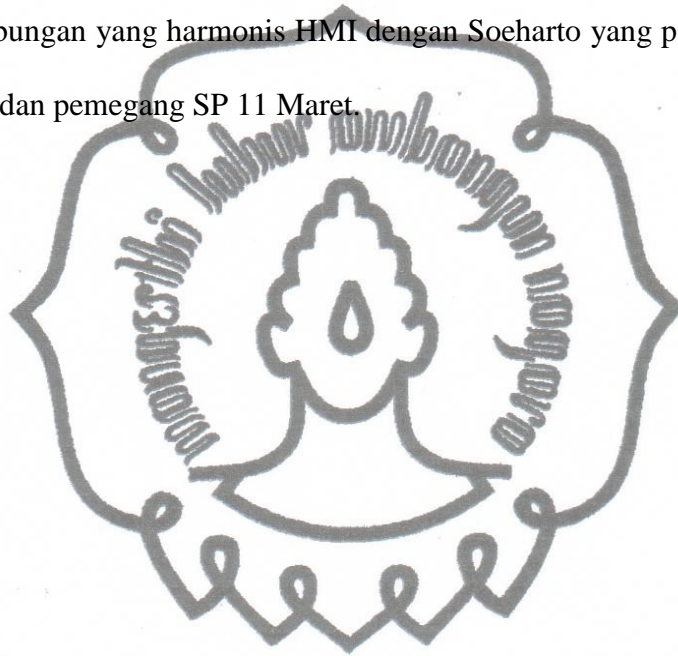
Sumber: Harian Umum Berita Yudha 15 Juli 1966

Besok harinya, pemikiran HMI tersebut telah menjadi berita utama Harian Berita Yudha, sebuah harian yang dikenal dekat dengan Angkatan Darat. Pada penerbitannya tanggal 15 Juli 1966, surat kabar itu menulis: Khusus pertemuannya dengan pimpinan HMI, Soeharto telah menerima pernyataan dukungan yang sepenuhnya “Berdiri di belakang Pak Harto” dan mendukung sepenuhnya terhadap semua tindakan serta langkah-langkah yang telah diambil Soeharto, di samping HMI

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 55

juga mendesak agar Soeharto sebagai pengemban SP 11 Maret dapat memimpin Kabinet Ampera yang akan datang.<sup>21</sup>

Soelastomo menyatakan bahwa HMI sadar betul TNI sebagai partner. Ini terbukti ketika militer memberikan senjata kepada aktivis HMI walaupun tidak semuanya. Soelastomo mengaku juga diberikan senjata otomatis.<sup>22</sup> Demikianlah gambaran hubungan yang harmonis HMI dengan Soeharto yang pada saat itu sebagai petinggi TNI dan pemegang SP 11 Maret.



---

<sup>21</sup> *Harian Berita Yudha*, Jumat 15 Juli 1966

<sup>22</sup> Wawancara dengan Soelastomo (10 Desember 2007)  
*commit to user*

## BAB 5

### KESIMPULAN

Tahun 1966 merupakan salah satu tahun yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia pada khususnya suasana politik. Setahun sebelumnya terjadi peristiwa yang masih penuh kontroversi yaitu G30S. Peristiwa ini mengakibatkan perubahan perimbangan politik Indonesia. Kemudian pada bulan Maret 1966 terbitlah Supersemar yang sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Pada tahun 1966, bangsa Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan nasional.

Di tahun ini jugalah HMI menggelar kongresnya yang ke-VIII. Terlepas dari kegiatan rutin sebuah organisasi, kongres ini diyakini kental dengan nuansa politik yang ikut memberikan pengaruh pada masa dualisme kepemimpinan ini.

Pemilihan lokasi kongres di Surakarta juga bukan tanpa alasan. Surakarta merupakan basis massa politik PKI. Di kota inilah FDR yang merupakan cikal bakal PKI dibentuk. HMI yang merupakan salah satu musuh PKI mencoba memutar itu semua dan secara eksplisit ingin menunjukkan bahwa HMI mampu menundukkan keperkasaan PKI dengan mengadakan Kongres di Surakarta.

Dalam Kongres ini menghasilkan beberapa hal yang sedikit banyak merupakan respon dan juga memberikan pengaruh pada kondisi sosial politik saat itu. Kebijakan HMI setelah meninjau dari perimbangan politik saat itu maka strategi yang diletakkan dan harus mencapai target adalah mempertahankan dan memperkuat posisi Orba dalam segala hal dan menghancurkan Orla. Langkah-langkah strategi dasar untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan



mengintegrasikan umat Islam yang merupakan basis potensi HMI, persatuan progresif revolusioner Pancasila sebagai dasar pembinaan Orde Baru, dan peningkatan terus kualitas HMI. Langkah-langkah tersebut kemudian dilaksanakan dan menjadi kebijakan HMI dalam pembinaan kekuatan Orde Baru, rehabilitasi mental menuju pembinaan mental yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kewaspadaan terhadap gerpol sebagai perangkat strategi Orla, dan pendekatan konstitusional yang sekaligus adalah usaha menumbuhkan kehidupan politik baru dalam rangka menegakkan demokrasi.<sup>1</sup>

HMI sedikit banyak juga memainkan peranan sebagai salah satu pengusung dan pendukung pada masa dualisme dan transisi pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 1966 bangsa Indonesia mengalami apa yang dinamakan dualisme kepemimpinan nasional dan terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret. Bung Karno yang merupakan Presiden RI yang sah mulai kehilangan legitimasinya di masyarakat. Soeharto sebagai pengemban Supersemar berhasil memikat hati dan memberikan pengaruhnya di masyarakat Indonesia.

Pada kongres ini pun terlihat sangat istimewa karena melibatkan anggota RPKAD untuk pengamanannya. RPKAD merupakan pasukan khusus yang dulu juga pernah digunakan untuk mengatasi G30S. Selain itu dalam kongres ini pun, Soeharto ikut menyampaikan pidato sambutan pada acara pembukaan Kongres.

Dalam kongres ini dapat terlihat bahwa HMI mendukung pembentukan Orde Baru. Dalam pidato Soeharto pada pembukaan kongres ini tersirat jika Soeharto meminta “restu” untuk segera membentuk Orde Baru.

---

<sup>1</sup> Laporan Pengurus Besar HMI pada Kongres VIII di Surakarta 10-17 September 1966

Ketika Soeharto ingin memberntuk Orde Baru, Soeharto mengundang HMI untuk mengikuti *hearing* kabinet. Beberapa anggota HMI pun akhirnya juga dapat menjabat posisi menteri.

